Pertemuan Regional Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna II

“Maju Bersama Menuju Perikanan Tuna yang Berkelanjutan”

Jakarta, 18-19 Desember 2019

Prepared by: Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia-MDPI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 3
TUJUAN 3
PESERTA KEGIATAN 4
RANGKUMAN AGENDA KEGIATAN 4

HASIL PERTEMUAN: Hari I, 18 Desember 2019 5
Pengantar dan Laporan Kegiatan: Saut Tampubolon, Direktur Eksekutif MDPI 5
Sambutan dan Laporan Kegiatan: Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP 6
Arahan dan Pembukaan Kegiatan: Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 6
Panel Diskusi Sesi I 9
Panel Diskusi Sesi II 11
Panel Diskusi Sesi III 14

HASIL PERTEMUAN: Hari II, 19 Desember 2019 17
Panel Diskusi Sesi I 17
Panel Diskusi Sesi II 22
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 25
Kesimpulan 25
Rekomendasi 27
Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan 29
Lampiran 2. Agenda Kegiatan 31
Lampiran 3. Daftar Hadir Peserta 34
Lampiran 4. Link Download Materi Presentasi dan Dokumentasi 45
Lampiran 5. Link Berita Kegiatan Pertemuan Regional FCMC-II 45
Lampiran 6. Topik Isu Diskusi untuk Panelis 46

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 menetapkan bahwa sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan kekayaan alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang harus dikelola secara berkelanjutan, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudnyatakan kebijakan tersebut, maka tatakelola sumberdaya ikan yang baik menjadi salah satu prasyarat yang harus dirancang dan dilaksanakan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumberdaya ikan termasuk jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis penting antara lain seperti tuna, cakalang dan tongkol. Menurut the *State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA), Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap produksi perikanan TCT dunia dan sekitar 20% terhadap perikanan nasional. Mengingat peran penting perikanan TCT untuk Indonesia, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 107 tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Keputusan ini menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya TCT secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah termasuk para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Peter William (2017), pengelolaan tuna mutlak didasarkan pada ketersediaan dan mengatakan:

- Data tidak tersedia *(No Data)* maka tidak ada analisis, sehingga tidak ada pengelolaan *(No Management)*
- Data tidak baik *(Poor Data),* maka pengelolaan memiliki ketidakpastian *(Uncertainty).*
- Data yang bagus *(Good Data),* maka pengelolaan dapat diprediksi *(Predictable).*

Mengingat data merupakan dasar pelaksanaan praktek pengelolaan perikanan Tuna, maka Dinas Kelautan dan Perikanan bersama MDPI menggagas pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikana Tuna di tingkat provinsi yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Komite ini merupakan salah satu wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan perikanan Tuna untuk bersinergi mewujudkan pemanfaatan sumberdaya Tuna secara berkelanjutan. Mengingat faktor kebersamaan antar pemangku kepentingan menjadi syarat dalam proses pengambilan keputusan pada komite ini, maka komite ini sesungguhnya merupakan ***Komite*** bersama. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan dapat lebih diperkuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran **serta masyarakat.**

TUJUAN

Pertemuan Regional Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna (*Co-Management*) dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Indonesia (RPJMN 2020 - 2024).
2. Sosialisasi kebijakan dan rencana kerja pengelolaan perikanan tuna 2020 – 2024.
3. Mendapatkan informasi terkini tentang pelaksanaan logbook dan/atau e-logbook untuk nelayan kecil, SIMKADA dan DIVA-Tuna.
4. Mencari potensi solusi terhadap 6 (enam) tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan nelayan
5. Pengenalan isu gender (Perikanan) dalam Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di Provinsi Sulawesi Utara (sebagai pilot project)

PESERTA KEGIATAN

Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari berbagai stakeholder dan media, yaitu:

a. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Edhy Prabowo, yang membuka kegiatan dengan resmi.
b. Perwakilan dari lingkup pemerintahan meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang terlibat yaitu Dinas Perikanan Kab. Buru, Maluku Tengah, Ternate, Halmahera Selatan, Kepulauan Morotai, Lombok Timur, Kota Kupang, Bone dan Manado.
c. Perwakilan dari lingkup perguruan tinggi dan lembaga penelitian yaitu LIPI Ambon, FPIK IPB, FPIK Unpatti, FPIK Unkhair, FPIK Unsrat, Fakultas Pertanian, Jurusan Perikanan Unram, dan FKP Undana
d. Perwaklian dari lingkup Industri yaitu PT. Harta Samudera, PT. SMS, PT. Sinar Purefood International, PT. Chenwoo Fisheries, PT. Pahala Bahari Nusantara. Beberapa perwakilan supplier tuna/cakalang dari Buru, Seram, Ternate, Morotai, Bacan, Pulau Bisa, Sanana, Tolitoli, Sangihe, Manado, Sangihe, Bone, Lombok Timur dan Kota Kupang
e. Perwakilan nelayan tuna dari Buru, Seram, Ternate, Morotai, Bacan, Pulau Bisa, Sanana, Lombok Timur, Kupang, Bone, Sangihe, dan Manado
f. Perwakilan dari partner Asosiasi, LSM dan Donor, yaitu AP2HI, EDF Indonesia, Yayasan IPNLF, MSC Indonesia, YKAN, WWF Indonesia, SFP, LINI, WCS, Fair Trade, PT. Hatfield Indonesia, Packard, Walton, USAID SEA, USAID Ocean, dan USAID Indonesia
g. Perwakilan media yang hadir untuk meliput yaitu Merdeka.com, Beritasatu TV, Detik.com, Suara.com, Kompas TV, Kompas, Kompas.com, Katadata.co.id, Bisnis Indonesia, Harian Detik.net, Jendelanews.co.id, Mongabay. Hadir juga media dari lingkup KKP yaitu dari DJPRL dan BKHLN.

RANGKUMAN AGENDA KEGIATAN

Pertemuan dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ruang Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV lantai 15, dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 18 dan 19 Desember 2019. Peserta pada hari pertama berjumlah sebanyak 197 orang dan hari kedua berjumlah 106 orang. Pertemuan ini membahas dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang ada di masing-masing provinsi, dan disampaikan langsung dari masing-masing perwakilan DKP provinsi, seperti pembentukan KUB dan Koperasi nelayan, proses penerbitan KUSUKA, kebijakan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil, pemanfaatan rumpon, proses penerbitan BPKP, pendaftaran dan penandaan kapal perikanan serta penerbitan pas kecil atau pas besar untuk kapal perikanan. Dari penyampaian tantangan-tantangan tersebut, langsung ditanggapi terkait potensi solusi saat ini untuk mengatasi masalah tersebut oleh pihak berwenang, dalam ini KKP dan Ditkapel, Kemenhub. Sehingga, beberapa rekomendasi diperoleh dalam rangka menjadi potensi solusi terkait tantangan-tantangan yang ada.

Pada saat memberikan arahan, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyampaikan bahwa dalam mengatasi tantangan yang ada, diperlukan diskusi seperti yang dilakukan saat ini, yaitu melibatkan seluruh stakeholder. Karena hal ini sangat penting dalam rangka menyerap masukan-masukan dari nelayan, pelaku usaha, pemerintah daerah, LSM, dan lembaga lain yang terkait.

HASIL PERTEMUAN: Hari I, 18 Desember 2019

Pengantar dan Laporan Kegiatan: Saut Tampubolon, Direktur Eksekutif MDPI

Pertemuan ini adalah pertemuan ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di 6 Provinsi dan dihadiri sekitar 150 orang, terdiri dari perwakilan DKP dari 6 Provinsi, Perwakilan Nelayan, Supplier, Akedemisi, Industri, LSM dan Perwakilan Donor. Pertemuan regional ini dilakukan **setiap tahun di Jakarta** dan merupakan platform untuk melakukan konsultasi dan partsisipasi dalam proses pengelolaan perikanan tuna bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan pertemuan sejenis di tingkat provinsi secara teratur dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun

Berdasarkan Arahan Program dalam Kesepakatan Bersama antara KKP dan MDPI tanggal 7 Desember 2018, berikut dilaporkan secara ringkas capaian MDPI bekerjasama dengan enam DKP Provinsi (Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara) sebagai berikut:

1. **Pengembangan Kelembagaan.**
   Telah disusun Dokumen Panduan Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna yang telah disyahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di 6 (enam) Provinsi, dan ditindaklanjuti dengan Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di 6 (enam) provinsi. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun panduan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI. Pembentukan 40 Kelompok Nelayan Fair Trade yang kita harapkan akan kita kembangkan menjadi Koperasi Nelayan. MDPI telah membina sebanyak 10.553 orang terdiri dari Nelayan 5.914 orang; Non-Nelayan 4,535 orang; Supplier 104 orang.

2. **Pelaksanaan *Legal, Reported and Regulated Fisheries.***
   MDPI telah memfasilitasi penerbitan Pas Kecil sebanyak 763 kapal dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan sebanyak 531 kapal.

3. **Pengembangan database perikanan tangkap** yakni I-Fish database yang telah mendukung penyusunan *Harvest Startegy (HS)* untuk *yellowfin tuna* di Perairan kepulauan Indonesia termasuk laporan tahunan Indonesia kepada WCPFC.

4. **Pengembangan Teknologi Ketertelusuran**.
   Bersama mitra, MDPI telah mengembangkan teknologi ketertelusuran *TraceTales* pada unit pengolahan ikan, yang merupakan karya anak bangsa 100%. Dengan menggunakan *TraceTales*, pencatatan produksi di UPI tidak lagi menggunakan kertas, dan telah dihasilan produk tuna yang dapat ditelusuri *(traceable tuna product)* sebanyak 3.500 ton.

5. **Penguatan Akses Pasar.**
   Penguatan akses pasar dilakukam melalui sertifikasi produk perikanan. Sebanyak 1.728 ton tuna yang dapat ditelusuri telah memperoleh sertifikasi Fair Trade dari USA, dengan melibatkan sebanyak 1.200 nelayan. Dana Premium yang telah ditransfer kepada nelayan sebesar Rp. 7,5 milliar. Saat ini MDPI sedang memfasilitasi Mitra Industri dalam proses memperoleh sertifikat ecolabel *Marine Stewardship Council (MSC).* Bilamana tidak terdapat *public complaint* sampai 26 Desember 2019, maka Indonesia akan melakukan ekspor *Yellowfin tuna* dari alat tangkap *handline* dengan label MSC pada bulan Februari 2020. Hal ini akan menjadi sertifikat MSC yang pertama di dunia untuk handline tuna nelayan kecil.

6. MDPI juga telah melaksanakan ragam pelatihan dan *awareness building program* seperti kesetaraan gender dalam pengelolaan perikanan, penanganan ikan yang baik diatas kapal, mitigasi bycatch dan ETP species, pengelolaan keuangan untuk wanita, keselamatan di laut, kebersihan pantai, pemanfaatan sampah plastik dan lain-lain.

Namun demikian, disamping capaian sebagaimana kami laporkan diatas, terdapat beberapa tantangan yang sekiranya dapat dicari potensi solusinya melalui pertemuan ini, antara lain mencakup:

1. Ketersediaan BBM Minyak untuk nelayan kecil baik dari sisi volume yang sering tidak mencukupi dan harga cukup mahal (BBM satu harga tidak sampai kepada nelayan kecil).
2. Perolehan dokumen kapal seperti Pas Kecil dan Pas Besar memerlukan waktu yang cukup lama sampai 5 bulan.
3. Nelayan belum dapat mengakses kartu KUSUKA yang diterbitkan KKP, misalnya kami telah memfasilitasi 180 aplikasi di Buru, 130 di Seram dan 30 di Lombok, namun hingga saat ini belum ada kartu KUSUKA yang terbit.
4. Pengaturan pemanfaatan rumpon, sebagai alat bantu penangkapan ikan, sehingga perikanan rumpon dianggap *unregulated fisheries.*
5. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama atau Koperasi Nelayan.
6. Penerbitan Buku Kapal Perikanan dan Penandaan Kapal Perikanan untuk kapal berukuran sampai 30 GT.

Sambutan dan Laporan Kegiatan: Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP

1. Terkait penguatan data: nelayan kecil secara voluntary perlu melaporkan data, quota, dan status. Pelaporan selama ini hanya mengandalkan kapal di atas 30GT. Tangkapan dari nelayan kecil perlu didata untuk dapat harga premium
2. Kegiatan yang dilakukan DJPT Menyusun HS, strategi pemasaran, penguatan akses pasar. Harga premium seperti yang dilakukan MDPI merupakan terobosan yang sebelumnya belum pernah ada.
3. Telah hadir hampir 150 orang yang ada dalam FCMC, untuk merundingkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Mudah-mudahan ada solusi optimal dari pertemuan ini.
4. Diharapkan FCMC yang sekarang melibatkan sepuluh ribu nelayan nantinya bisa berkembang dan nantinya bisa dilakukan ke wilayah lain.
5. KKP akan mendiseminasi draft pengelolalan TCT. Karena Indonesia merupakan produsen tuna terbesar dimana 70% tangkapan tuna adalan nelayan kecil. Sehingga penting untuk menjamin tata kelola tuna.
6. DJPT telah melakukan sosialisasi e-logbook untuk menggantikan ratusan kertas. Sekarang sudah 6.000 kapal besar yang pakai. Kapal besar tidak bisa melaut kalau tidak pakai ini.
7. Isu pendataan terkait SIMKADA. Kalau pusat sudah hampir lengkap. Namun daerah masih belum semuanya. Seratus ribu kapal provinsi sudah masuk dalam SIMKADA.
8. Database of Indonesia Vessel Authorized /DIVA TUNA akan segera dilengkapi

Arahan dan Pembukaan Kegiatan: Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

1. Sangat berbahagia hadir, KKP terasa hadir dimata semua nelayan
2. Acara seperti FCMC harus diperbanyak sebagai upaya untuk menyentuh nelayan kecil. Nelayan besar protes paling banyak dan media sering meliput. Nelayan kecil tidak mampu protes karena tidak bisa didengat.
3. Walaupun jumlah nelayan kecil lebih banyak dibanding nelayan besar, tidak boleh ada dikotomi antara nelayan kecil dengan nelayan besar. Sesuatu yang harus berjalan bersama. Bila semua berjalan sendiri tidak terjadi harmonisasi.
4. KKP ingin ada suasana harmonisasi dalam laut baik nelayan kecil dan nelayan besar. Modern dan tradisional. Bila hanya fokus dengan tradisional negara bisa tertinggal, bila negara hanya fokus dengan kemajuan/modernisasi negara menjadi lalai. Tidak boleh ada tradisonal yang ditinggal modernisasi dan tradisional tidak boleh menghambat modernisasi. KKP jelas tidak memisahkan 2 kepentingan.
5. Terkait BBM. Isunya sama seperti di daratan. Jangankan nelayan, seperti di daratan sama juga cerita dengan pupuk subsidi. Bila diperkebunan besar ada, pasti petaninya tidak dapat. Pak Edhy

mengalami saat menjadi ketua komisi 4 SUMSEL. Pabrik ada disana, masyarakat yang berhak hanya dapat 40% walupn pabriknya ada disana. Bocor karena ada perkebunan.

6. **Menteri berharap agar tidak hanya cerita tentang BBM kurang namun ada diskusi yang mengarah.** Seperti bagaimana cara supaya bisa menyetok BBM. Cara untuk meminimalisasi isu. Diharapkan ada langkah yang dibicarakan dalam komunitas besar/kelompok besar. Bikin SPBN mudah, bisa dengan anggaran KKP/pertamina koordinasi BUMN tapi yang penting adalah setelah itu ada, apakah masih bisa dikontrol oleh nelayan. Bagaimana nanti menghadapi preman yang memegang wilayah. Biasanya preman lebih berkuasa dari tentara dan polisi. Ini yang harus kita hindari. Beri tahu KKP langkah-langkahnya. SPDN dibangun harus dibawah control kendali nelayan. Sehingga diantara nelayan tidak ada yang bermain. Masing-masing dapat quota yang sesuai, tidak mendapatkan jatah subsidi tiap dijual.
7. Kapal <10 GT pasti subsidi. Pak Menteri butuh masukan usulan seperti apa yang diperlukan. Dari Daerah pemilihan ada isue SPBN dibuat namun nelayan tetap tidak kebagian. Tidak usah saling menyalahkan, namun bagaimana upaya menjaganya.
8. KKP mendapat Tugas dari presiden
   - ✓ Infrastruktur. Pengadaan bahan bakar utk melaut
   - ✓ SDM –bagian dari vokasi. Malu muncul orang seperti Pak SAUT, swasta lebih maju dijadikan mitra. Model seperti MDPI lain harus diajak komunikasi. Cara mengelola laut seperti kelola dunia karena laut tidak ada batas. Apa yang terjadi ditempat kita akan berdampak ketempat lain. Entah kapan. Mengelola semua di negeri ini harus sustainable. Menteri KP tidak setuju eskploitasi besar-besaran baik laut, hutan, tambang. SDM bukan hanya mencari ikan membuat ikan menjadi harga tinggi. Tapi juga menjaga sampah laut. Semua masalah muara ke laut. Kencing digunung/buang sampah, semua lari ke laut. Indonesia merupakan salah satu penyuplai sampah terbesar. Diharapkan semua orang bisa menjaga laut. Bila ada sampah diambil. Kedepan KKP akan membuat tempat pengolahan sampah menjadi biji-biji plastik. Diharapkan MDPI ikut terlibat dalam kegiatan pengurangan sampah.
   - ✓ Birokrasi dan Aturan. Semua yang berhubungan dengan nelayan akan di permudah dan perkuat controlnya. Semua kegiatan tangkap ikan bila disertai perusakan akan menghadapai KKP. KKP sudah bekerja sama dengan Jaksa agung, kapolri agar nelayan kecil tidak boleh langsung pidana tapi harus di bina dulu. Pembinaan ke nelayan untuk mendapatkan suatu terobosan yang besar. Saya harapkan bisa terjadi secara terus menerus.
   - ✓ Transformasi. Kita Tidak boleh tinggal diam karena situasi, harus maju bila ada kesulitan. Silahkan disampakan, selama bisa diselesaikan dalm KKP akan kami selesaikan.
9. Terkait izin-izin dibawah 30 GT cukup prov kab. KKP sudah membuat sistem yang akan dilaunching dimana izin selesai dalam 1 jam bila semua syarat terpenuhi. Bila semua clear, akan sudah terima online. Bila ada masalah mengadu ke PSDKP untuk mengawal.
10. Kedepan aturan yang memberatkan atau tidak perlu akan di revisi. Ada 29 aturan yang menjadi polemik sedang di kaji. Yang diperjuangkan nelayan dan lingkungan.
11. BKP terkait masalah nelayan andon (izin antar provinsi). Bila nangkap di wilayah lain, bisa ajukan ke KKP.
12. Pak Menteri menanyakan data ke Pak Dirjen DJPT Data Kapal 1-2 GT yang bisa mengubah dan menggerakan Kapal 40 GT. Tahun 2020 dana KUR baru akan diluncurkan 190 triliuun utk masyarakat. Dulu 25 juta sekarang bisa 50 jt utk mikro. 6 % tanpa agunan. Apabila nelayan tuna mau beli Kapal besar 5 mil, (misal) bisa kumpul 100 orang. Namun perlu didampingi. Agunannya Kapal tsb. Konsep KUR. Nelayan harus kompak kecil dan besar.
13. Kita harus menjaga lautan Indonesia sama-sama. Para nelayan yang sering ditengah laut menjadi pemberi info kepada KKP.
14. Menteri berharap acara ini bisa menghasilkan keputusan seperti yang diharapkan terbaik. KKP akan selalu setia dan akan selalu membackup nelayan. Nelayan kita harus bangkit dan maju, harus punya kapal2 yang besar, bila program ini berjalan anda sudah begitu, menuju ZEE bukan isu yang sulit.

15. KUR tidak hanya untuk tangkap, tapi juga Coldstorage, processing atau sarana punya nilai keekonomian. KKP tidak memberikan anggaran untuk pembangunan, karena bila dibantu KKP tidak ada tanggung jawab. KKP akan terus mendata bantuan yang diberikan dan nilai ekonominya bermanfaat buat semua.
16. Acara resmi dibuka.

Panel Diskusi Sesi I

Syahril Abd. Raup (Plt. Direktur PSDI)

Arah Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan perikanan tuna 2020-2024

1. Setiap 5 tahun ada RPP TCT. KKP sedang merancang aturan RPP 2020-2024. Selain RPP ada 29 aturan lain yang sedang direvisi dan nanti diterbitkan. Omnisbuslaw sedang membahas untuk difinalisasi.
2. Masalah data menjadi yang paling perlu mendapat perhatian.
3. Logbook adalah data nelayan. Sekarang ada ratusan orang yang melakukan verifikasi data.
4. Dengan e-log book bisa mengetahui data Kapal yang menangkap Tuna. Species, titik koordinat dan lokasi pendaratan. Provinsi tidak perlu buat baru, akan diberikan dashboard untuk bisa melihat data e-log book, melihat berapa banyak jumlah yang ditangkap.
5. KKP harapkan kerjasama dengan mitra agar bisa diterapkan di provinsi supaya bisa sinergi.
6. Ada 180 observer di Pelabuhan untuk membantu. Mulai tahun 2019 Observer kerja di pelabuhan bila tidak melaut sehingga harapannya data semakin bagus. Termasuk Tuna, data untuk port sampling. Untuk memperbaiki data.
7. DJPT melakukan kerjasama dengan 11 kampus. Mahasiswa yang ingin penelitian. Ada 110 mahasiswa yang naik Kapal. Semua kampus yang ada perikanan untuk membantu perikanan diatas Kapal. Mahasiswa diperkenalkan dengan industri perikanan, kapal besar.
8. KKP mendukung masuk teknologi termasuk e-monitoring/kamera diatas Kapal untuk Kapal angkut. dari Kapal tangkap ke Kapal angkut. Ada rencana dirubah juga. Akan dicari yang lebih murah karena saat ini mahal. Ini perlu diatur ulang karena mahal.
9. KKP akan melakukan perbaikan sistem pendaftaran. Nelayan yang tidak ada akses dibantu. Adanya keterbatasan karena pulau-pulau. Sebelumnya ada MoU dikumpulkan nelayan contoh untuk 800 kapal, dilakukan pengukuran dan terbit ditempat. Mungkin bisa diadaptasi di kelompok FCMC.
10. Kapal yang menangkap tuna harus bisa diakses oleh buyer.
11. Rumpon merupakan aturan yang akan direvisi. Masalah pendataan rumpon belum bagus. Rumpon kalau bisa pemutihan ditata ulang kemudian dikasih yang resmi.
12. HS diharapkan berdasarkan data/hasil analisa.

Sesi Diskusi

1. Nurliah (Universitas Mataram/UNRAM)
   - ➔ Pernah memiliki pengalaman, pada tahun 1998 penelitian di Bajo. Tidak ada data produksi selama 10 tahun terakhir. Dulu data dianggap tidak penting. Namun sekarang sudah banyak dilakukan usaha pengumpulan data. Apresiasi untuk KKP atas pencapaian tersebut
   - ➔ KKP perlu melakukan kerjama dengan Universitas, baik dari pengembangan SDM maupun sharing data. UNRAM belum ada kerjasama dengan KKP. Mungkin bisa kerjasama tahun 2020
   - ➔ Setelah ada data, kebijakan yang sudah diambil based on data. Apakah sudah diaplikasikan?
     Untuk DJPT semua data sudah terintegrasi. Data log book hanya 60% yang bisa digunakan. Keakurasiannya hanya 20%. Terkait kepatuhan perikanan. Untuk kapal berukuran > 30 GT, log book digunakan sebagai bahan untuk perpanjangan izin
   - ➔ Bagaimana akses universitas terhadap data yang dimiliki oleh KKP?
     Aplikasi log book baru dilaunching. Namun kedepan data bisa diakses dengan privilege masing-masing. Antara DKP, universitas, dan mitra.

2. Paudino bin Usman, nelayan Sanana (ketua komite FT)
   - ➔ Penjelasan terkait aturan rumpon bagaimana? Bagaimana juga melanjutkan sampai kedepan kalau kita tidak menjaga baby tuna. Mengapa hewan-hewan lain dilindungi, hewan yang seperti itu tidak dilindungi?

Ada permen KP terkait aturan pemasangan rumpon. Namun sangat kuatir bila tidak diatur akan mengganggu ekosistem. Mudah-mudahan kedepan akan dirapikan. Sudah mengirim surat ke Kadis untuk mulai mendata rumpon. SDI sudah punya data Kapal yang sama, tempat penangkapan yang sama dan berulang-ulang (rumpon). Akan bertemu dengan perizinan.

3. Febrian Budianto (DKP SULSEL)
   - ➔ Bagaimana Penerapan e-log book?
     HP harus sudah android, generasi ke dua mungkin lebih bagus tampilan dan lebih memudahkan. Harapannya ini seperti google map. Gratis, dapat mengakses lokasi ikan, mengetahui kedalaman, kecepatan arus, dilokasi yang paling sering didatangi nelayan. USAID pernah bantu 50 android. Nelayan butuh entertainment ditengah laut. (bebas signal) sistem sama seperti google map. Walaupun internet mati masih bisa akses GPS.
   - ➔ Saat dilapangan masuk kedalam aplikasi e-logbook susah.
     Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan. Banyak isu yang terjadi seperti salah sentuh/*touch* saat dilaut. Harusnya sebelum dilaut aplikasi sudah dipersiapkan.
   - ➔ Minta penegasan ke SDI kalau e-logbook sudah harus diterapkan tanpa SIUP /SIPI?
     Aplikasi sebaiknya dinas langsung yang mengoperasionalkan (<30 GT). Bila dinas bisa memiliki 2 atau 3 verifikator akan sangat bagus. Harapannya kedepan, data log book untuk kapal berukuran < 30 diverifikasi oleh dinas saat akses sudah dibuka
   - ➔ Rumpon sudah sering dibahas dalam berbagai pertemuan, namun sampai sekarang masih belum ada aturan baku. Mau dikemanakan rumpon karena banyak bertebaran. **Tidak ada jawaban?**

4. Romelus Far-Far (Kadis DKP Prov Maluku)
   - ➔ Saat aplikasi tidak diakses, diharapkan sudah ada back up plan. Proyeksi data dari mana. Kondisi listrik, sehingga data tidak bisa dimasukan bagaimana bisa memercayakan data yang ditampilkan?
     Infrastuktur masih menjadi masalah. Walaupun sudah diberi internet namun tidak bisa dilakukan karena tidak ada pulsa. contoh seperti di Dobo
   - ➔ Klarifikasi mengenai Dobo, bukan karena kurang pulsa tapi penempatan Towernya di batalyon. Signal tidak sampai dipelabuhan. Permintaan Pak Far-Far ada event, untuk mendiskusikan terkait pengumpulan data walaupun aplikasi tidak ada.
     Saat ini berbicara Tuna harusnya ada pemetaan. Harus ada enumerator yang cukup untuk wilayah-wilayah tadi. Nelayan di Maluku 151.000. Sampel yang ada di Buru sekarang baru 1 %.

Panel Diskusi Sesi II

Moderator (Hary Christijanto, PSDI KKP)

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan tuna di daerah.

- ➔ Pembentukan KUB dan koperasi nelayan. (Biaya, tata cara dan teknis pelaksanaan)
- ➔ Penerbitan Kartu KUSUKA yang menjadi bentuk pengakuan pemerintah atas nelayan. Bagaimana kaitan kusukan dengan Kapal
- ➔ Bahan Bakar bersubsidi (Premium) yang mulai langka, dan harganya mahal

1. Buyung Radjiloen/DKP Malut (Kebijakan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil)

1. BBM masih menjadi kendala, karena quota dan juga harga
2. Lokasi SPDN jauh mengingat Maluku Utara adalah wilayah kepulauan. Sehingga distribusi agak sulit, yang menyebabkan harga meningkat.
3. Sudah pernah menyampaikan usulan kebutuhan BBM nelayan kepada pertamina namun belum bisa dipenuhi sampai sekarang.

2. Ahmad Umarela/DKP Maluku/KUSUKA :

1. Seharusnya KKP yang mensosialisasikan KUSUKA
2. Kusuka berfungsi sebagai identitas profesi sebagai pelaku usaha perikanan.
3. 15.000 (Lima belas ribu) nelayan yang sudah divalidasi sampai tingkat KKP, namun kartu kusuka yang terbit baru 2000 (dua ribu)
4. Tidak ada jaringan internet contoh Maluku Barat Daya. Pulau Maluku ada 1342 pulau, infrastruktur masih menjadi isue. Perlu menjaga kerjasama dengan kominfo untuk pulau-pulau yang jauh.

3. Febrian Budianto/DKP Sulawesi Selatan/Pembentukan Kelompok Usaha Bersama.

1. KUB menjadi cikal bakal/embrio koperasi.
2. KUB di Sulawesi Selatan ada 904 kelompok dan sudah 10 % yang mendirikan koperasi
3. KUB dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Saat individu masalah susah diketahui/dicarikan solusi sehingga perlu berkelompok.
4. Tujuan KUB : untuk menjembatani aspirasi masyarakat nelayan di lapangan dengan pemerintah
5. Peran KUB : sebagai Sarana kelembagaan (untuk menyalurkan pokok-pokok pikiran), sebagai penggerak masyarakat dalam upaya diversifikasi
6. KUB belum berbadan hukum
7. Sehingga diperlukan tindak lanjut untuk menjadi Koperasi, karena dianggap bisa menjadi solusi karena berbadan hukum

4. Dr. Ady Chandra, S.Pi, M Si./DJPT/Alokasi BBM Bersubsisi untuk nelayan kecil dan perizininan SPDN

1. Setiap tahun antara Nov-Desember kuota BBM habis. Kuota BBM tidak hanya untuk nelayan. Akhir November titik kritis. Tidak mungkin pemerintah mendeklarasikan bahwa BBM habis.
2. Dalam perikanan, faktor yang mempengaruhi kebutuhan nelayan : Jenis dan ukuran kapal , alat tangkap dan jumlah trip dan fishing ground menentukan BBM yang diserap.
3. Berdasarkan riset tahun 2016: kenaikan harga BBM menentukan pendapatan nelayan 5-100 GT naik 1% berdampak pengurangan pendapatan sampai 0.7%.
4. Sekarang ada 3 aturan tentang penyaluran distribusi BBM. Nantinya hanya ada 1 aturan. Sekarang sedang harmonisasi tentang penyaluran BBM, jumlah kuota, lama waktu rekomendasi.
5. Isue pelaksanaan :
   - Pertengahan tahun Pertamina dan PT. AKR→ tidak lagi menyalurkan bbm subsidi karena regulasi esdm.

- Contoh di Semarang, nelayan lebih senang beli BBM di Kapal tanker. Di Dobo harga BBM lebih murah dari subsidi. Kesadaran beli legal kurang.
- Beberapa lokasi peningkatan kuota kecamatan Jawa tengah. Karena Kapal sekarang 30 GT.
- Minim pelaporan realisasi subsidi BBM. Berdasarkan kepatuhan baru akan disubsidi. Laporan ada di SPBU tidak melapor ke dinas
- Pola BBM dibeli oleh yang modalin, sehingga harga suka-suka

6. Dulu banyak SPDN diminta dibangun dengan APBN. Namun sejak 2015 sudah tidak ada lagi. Karena mangkrak karena koperasi tidak siap mengelola SPDN /tidak ada modal.
7. Tahun 2019 ada 15 rekomendasi perikanan.
8. Kuota BBM Subsidi 2019=1.9 KL

5. Muhammad Idnillah /DJPT/Proses alur pembentukan KUB/koperasi dan manfaatnya

1. Nelayan kecil tidak perlu izin/izin gratis dan bisa menangkap ikan kemana saja
2. Nelayan tradisional fishing ground yang sudah diatur secara turun – temurun
3. Nelayan buruh > 10 GT. Pemilik sudah masuk dalam skala usaha.
4. Data nelayan tahun 2016. 2 juta nelayan.
5. Karakteristik nelayan Indonesia :
   - ✓ Mayoritas usia produktif.
   - ✓ Menjadi pilihan terakhir untuk sebagai mata pencaharian.
   - ✓ Pendidikan
   - ✓ Akses kredit, anggota koperasi , perlindungan
   - ✓ Akses kuangan cukup susah.
6. KUB di Indonesia per tahun 2018 sudah ada 18.000.
7. Kegiatan yang dilakukan: Mengadakan fintech: sisi administrasi, finacial literacy, akses ke bank
8. Di daerah ada dinas yang membantu akta pendirian koperasi. Tidak perlu ke pusat.
9. Program bantuan melalui KUB/Koperasi: Asuransi, beasiswa, pendanaan nelayan, Sehat nelayan (tanah nelayan bisa disertifikat untuk mejadi agunan dan modal).

6. Dhina Arriyana, S.Si (Kasubdit standarisasi Data) / Tata cara penerbitan Kusuka dan manfaatnya

1. Sejak 2018 Kusuka, data produksi dan bantuan pemerintah masuk dalam ruang lingkup Satu Data perikanan.
2. Satu data ada 1 standar data, 1 meta data dan 1 diseminasikan dalam 1 portal data.
3. Kusuka integrasi dari berbagai macam kartu (kartu nelayan, aqua card, PPJK –karantina). Pilih sebagai profesi utama.
4. Oktober 2019 PERMEN KP 42 tahun 2019 mengenai kartu pelaku utama sektor perikanan (KUSUKA).
5. Identitas tunggal bagi pelaku utama yang bergerak di bidang perikanan (nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar antar pelabuhan yang berlaku di Indonesia selama 5 tahun)
6. Primary key NIK di KTP—sama dengan nomor KUSUKA
7. Web online/dinas-dinas UPT terdekat. Syarat adanya NIK
8. Manfaat kusuka: Perlindungan/asuransi—pemberdayaan sarana penangkapan/budidaya, memberikan pelayanan (surat-surat izin/Kapal) untuk pembinaan dan monev – pelatihan
9. Teregistrasi sudah bisa mendapatkan program-program (e-kusuka) tanpa kartu fisik sudah bisa.
10. 1 juta kusuka sudah terbit. Diharapkan DKP Provinsi untuk bisa registrasikan pelaku usaha di wilayah dalam aplikasi.

Diskusi/Tanya-Jawab

1. Salman Adam (nelayan Ternate ketua komite)

- ➔ Cara dan pengurusannya skala kecil, peran penyuluh sangat minim. Karena penyuluhan minim. Harapan saya. Belum dapat kartu kusuka lebih diefektifkan penyuluh supaya nelayan skala kecil tahu cara kartu kusuka.

Sosialisasi sudah terus dilakukan. Dari 5000 orang penyuluh, 10 penyuluh terbaik. Walaupun daerah sulit ada 1 orang yang susah.

2. Frengky USAID OCEAN
   - ➔ Kuota penyuluh perlu ditambah Di Bitung
   - ➔ Nelayan sudah terdaftar namun kartu fisik tidak sampai apakah bisa dipercepat? Sudah sering mengevaluasi. Sekarang pencetakan dengan BNI. Kedapan akan kerjasama dengan BRI sebagai kartu ATM. Untuk program –pemerintah tanpa kartu sudah bisa.
3. Nostenly /Koperasi Taruna Selatan/Morotai
   - ➔ Nelayan di Morotai sudah berkoperasi. Apakah nelayan bisa langsung beli ke SPDN? Mengapa dinas tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kenelayan yang dibawah bimbingan koperasi walaupun sudah punya Kapal dan kartu nelayan? Apakah rekomendasi bisa diberikan tidak tiap trip /tiap hari? Contoh apakah bisa diberikan selama 1 bulan?
   - ➔ Aturan rekomendasi tidak harus dari koperasi. Bisa langsung individual. Diaturan sekarang rekomendasi dilakukan setiap trip. Mungkin kedepan bisa dibuat berlaku selama 1 bulan. Permasalahan ikan tuna di pulau untuk urus 1 kali rekom perlu perjalanan 2 dua malam sedangkan hanya trip menangkap untuk 1 hari. Harapan ini akan direvisi diaturan BBM migas yang baru. berlaku 1 bulan. Yang penting tidak melebihi kuota. Sehingga dapat mempermudah akses nelayan.

Closing Statement:

1. Pak Buyung: BBM dilapangan langka. Harap ada kebijakan baru.
2. Pak Umarella: Nelayan Jangan dipersulit. Kebijakan di Maluku berlaku 3 bulan dengan kuota perbulan tergantung dan maksimal 25 ton. Dengan syarat: Nelayan kecil dan punya BPKP. Masukan untuk KKP agar rekomendasi jangan diberikan untuk 1 trip karena nelayan kecil menangkap setiap hari. Untuk memperpanjang rekomendasi, harus ada laporan produksi sehingga ada manfaat. Kalau tidak ada laporan produksi tidak diperpanjang.
3. Febrian Budianto: ada banyak isue dalam usaha perikanan tangkap, harapannya bisa diselesaikan dengan nelayan yang memiliki kelompok.

Panel Diskusi Sesi III

Moderator (Aris Budiarto, PSDI KKP)

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan tuna di daerah.

- ➔ Tantangan Pemanfaatan Rumpon
- ➔ Pendaftaran Buku Kapal Perikanan dan Penandaan Kapal Perikanan untuk kapal sampai dengan 30 GT.
- ➔ Penerbitan Pas Kecil atau Pas Besar Kapal Perikanan

1. Lalu Wahyudi Adi Guna/DKP Provinsi NTB/Pemanfaatan Rumpon

Permasalahan Rumpon di NTB:

1. Belum ada rumpon yang berijin
2. Belum ada rumpon yang tanpa SIPI atau satu ijin untuk banyak rumpon.
3. Belum ada data valid tentang jumlah dan keberadaa rumpon.
4. Pemanfaatan rumpon akan merusak ruaya Ikan.

Kondisi:

1. Implementasi di lapangan menjadi sulit untuk nelayan penangkapan Ikan: entah itu kurangnya sosialisasi dll tapi yang menjadi focus adalah ketidaktahuan jarak mil.
2. Rencana pemasangan rumpon tidak memiliki titik kordinat yang pasti.
3. Pemasaangan rumpon dipengaruhi oleh insting dan kepercayaan turun temurun
4. Nelayan kesulitan menargetkan jarak antar rumpon 10 mil.

Tindak Lanjut:

1. Sosialisasi database rumpon
2. Diperlukan monitoring izin pemasangan rumpon
3. Monitoring jarak pemasangan
4. Hasil tangkapan dari rumpon
5. Penerapan konsep penangkapan ikan rumpon berkelanjutan.

2. Riana Handayani/PSDI-KKP/ Kebijakan Pemasangan Rumpon

- Produksi tuna Indonesia merupakan 16 % produksi tuna dunia (FAO,2015).
- Total produksi TCT tahun 2015 sejumlah 1.152.004 ton dengan nilai estimasi lebih dari 20 triliun
- Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak rumpon yang belum memiliki izin, sehingga sebarannya pun tidak dapat diketahui. Padahal pemasangan rumpon sangat berpengaruh terhadap jalur ruaya ikan.
- Melanggar PERMEN KP No. 26 Tahun 2014 Tentang Rumpon
- Melanggar Resolusi RFMO (Para 3 WCPFC-CMM 2016-01 dan Para 3 IOTC (Resolution 15/08)
- Menimbulkan *black campaign* oleh Greenpeace mengenai implikasi anti-rumpon di Indonesia yang mempertanyakan legalitas rumpon, pengendalian serta pelaporan hasil tangkapannya

  Regulasi Nasional:
  - Permen KP no. 26 Tahun 2014
  - PP no. 79 Tahun 2015

  Regulasi Regional:
  - WCPFC – CMM 2016-01
  - IOTC – Resolusi15/08

  Rencana tindak lanjut;

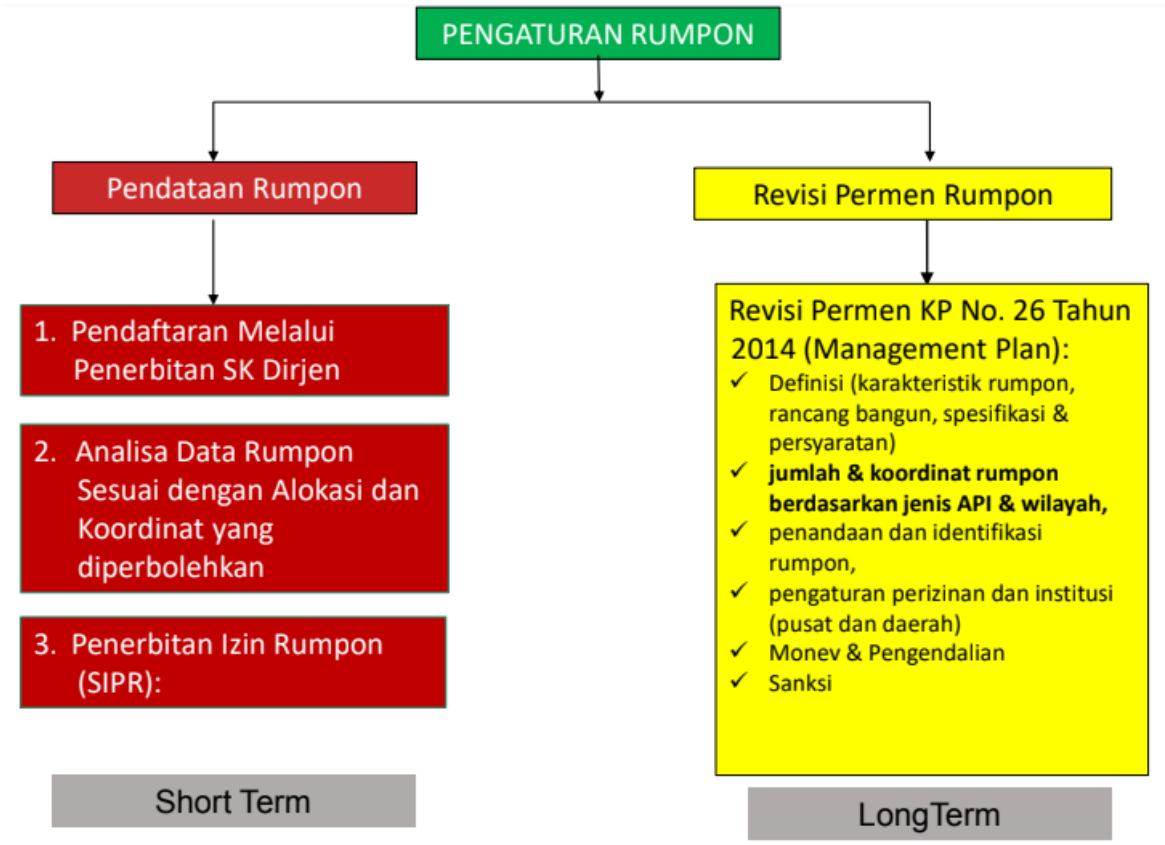

- Usaha yang dilakukan saat ini yaitu KKP sedang mengkaji beberapa permen, termasuk permen KP nomor 26 tahun 2014 tentang rumpon
- Saat ini DJPT-KKP telah mengirimkan surat permintaan nama petugas dan penginputan data rumpon ke dalam DIVA-Tuna kepada mitra kerja

3. Audy Dien/DKP Provinsi Sulawesi Utara/ Isu Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

Memiliki tantangan:

1. Meliputi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota lintas sektor
2. UU Perlindungan Nelayan, UU Perikanan, Aturan Kemenhub (Pemahaman Nelayan Kecil)
3. Penerbitan BPKP Kewenangan daerah dibawah 30 GT. Sedangkan Pas Kecil oleh KSOP/UPP setempat. Syarat BPKP, harus memiliki pas kecil terlebih dahulu yang diterbitkan oleh KSOP/UPP setempat yang melakukan pengukuran
4. Berdasarkan pengalaman yang ada, DKPD Prov. Sulut bersama MDPI membuat PKS bersama KSOP Manado, namun tidak berjalan dengan baik karena adanya sensitifitas lintas sektor

4. Syaiful/DJPT-KKP/Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan

- Pas Kecil MoU antara dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perikanan Tangkap sudah disahkan semenjak 2 tahun lalu
- Pas Kecil dapat digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh subsidi BBM, Kepemilikan dan Ketelusuran hasil tangkapan.
- Ada 17 Provinsi yang mengimplementasikan Pas Kecil.

5. Anita/DKP Prov. NTT/Penerbitan Pas Kecil Atau Pas Besar Kapal Perikanan

Tantangan:

- Provinsi NTT merupakan Provinsi Kepulauan yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan kapal.
- Pemahaman akan pentingnya kelengkapan dokumen kapal masih kurang (Masih Kurang Sosialisasi)
- Kurangnya Koordinasi lintas Sektor.

Usaha yang telah dilakukan yaitu:

- Meningkatkan kerjasama KSOP Kupang dengan DKP Provinsi NTT dalam rangka pendaftaran kapal

- Membuat 7 Kantor Cabang Dinas (KCD) dalam rangka mempermudah proses pendaftaran kapal untuk memperoleh pas kecil dan atau pas besar

6. Galih/Ditkapel-Kemenhub/Fasilitasi Penerbitan Pas Kecil dan Pas Besar Kapal Perikanan

- Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perikanan Tangkap telah membuat perjanjian kerjasama sejak tahun 2017
- Persyaratan Pembuatan:

  A. SURAT LAUT DAN PAS BESAR

  1. Surat ukur
  2. Grosse akta pendaftaran/balik nama
  3. Surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal

  B. PAS KECIL

  1. Bukti kepemilikan
  2. Identitas pemilik
  3. Surat keterangan mengenai data ukuran dan tonase kapal yang
  4. Diterbitkan syahbandar.

HASIL PERTEMUAN: Hari II, 19 Desember 2019

Panel Diskusi Sesi I

Ahmad Furkon/Ukon (Kabag Program Sesditjen DJPT)
Rancangan Kebijakan Pembangunan Perikanan Tangkap 2020 – 2024

Tahun 2019 adalah tahun transisi sambil menyelesaikan RPJM, sekaligus mengusulkan RPJM 2020-2024. Tentunya ini adalah kegiatan 5 tahunan. Secara teknokratik ini sudah disusun sejak awal tahun 2019. Bappenas sudah mengeluarkan rencananya. Sejak awal berproses dan Presiden juga sudah menyampaikan beberapa hal penting terkait agenda 5 tahun kedepan. Rencananya di akhir Januari 2020 rancangan RPJM ini akan difinalkan. Renstra akan ditetapkan dan masing-masing eselon I akan fokus pada masing-masing renstra sub sektor. Hari ini, bersama Bappenas akan menfinalkan rancangan RPJM di sektor perikanan, yang berkaitan dengan pertemuan komite regional ini

- Pertama terkait arahan presiden pada saat beliau dilantik tanggal 20 Oktober. Ada 5 hal utama terkait dengan agenda prioritas yang berkaitan dengan SDM, infrastruktur tetap menjadi prioritas, penyederhanaan regulasi terutama berkaitan dengan sektor-sektor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya sub sektor perikanan tangkap. Kemudian transportasi dan transformasi ekonomi
- Target di tahun 2045 atau tahun Indonesia emas, kita bisa masuk kedalam 5 besar PDB dunia. Dalam rangka mencapai itu maka, RPJM menjadi soko guru atau pijakan yang harus kita kuatkan agar apa yang yang sudah kita direncanakan di tahun 2020 - 2045 bisa tercapai untuk selanjutnya mencapai visi Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Mungkin ini adalah harapan yang luar biasa tetapi sudah dibuat step-stepnya untuk mencapai kearah tersebut
- Untuk membangun soko guru yang kuat di 2020 – 2024 ini, ekonomi menjadi salah satu prioritas. Target rata-rata pertumbuhan per tahun di 5 tahun kedepan adalah 6%. Dibuat bertahap, untuk tahun 2020 ditargetkan 5,3 % pertumbuhan ekonomi sampai 2024 itu 6,8% dengan rata- rata pertahun kedepan adalah 6 %. Ini juga menjadi fokus utama Pak Presiden dengan melihat capaian di tahun 2015 – 2019, maka fokus kedepan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi
- Kalau kita lihat per sub sektornya, dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional untuk pertanian termasuk perikanan rata-rata 3,9% dari sebelumnya 3,7%.
- Kita optimis bisa kita capai bahkan dengan berbagai upaya yang dilakukan harapan realisasinya lebih tinggi lagi dari angka 3,9 %
- Bappenas sudah mnsinersijakan visi dan misi dari Pak Presiden pada saat mendaftar di KPU dan menggabungkan dengan arahan Pak Presiden pada saat dilantik pada tanggal 20 Oktober mengenai 5 hal utama tadi. Kemudian disinergikan lagi dengan RPJM yang sudah dibuat. Berdasarkan rancangan RPJM, ada 7 fokus utama pembangunan 5 tahun kedepan salah satunya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- Untuk sektor perikanan termasuk perikanan tangkap didalamnya, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
- Dalam rancangan RPJM disebutkan bahwa ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas ini melalui kualitas pencapaian investasi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan makmur
- Sektor kelautan dan perikanan akan mnjadi andalan 5 tahun kedepan selain sektor lainnya yang berkaitan dengan sumberdaya alam seperti kehutanan, pertanian dan pariwisata
- 4 Pilar RPJM, selain kesejahteraan dan ekonomi, keberlanjutan menjadi pijakan kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- Hasil pertemuan Pak Menteri KP dengan semua stakeholder diantaranya pelaku usaha, nelayan, akademisi dan kunjungan ke beberapa tempat, beliau akan mmperkuat yang sudah kuat dan memperbaiki yang masih kurang serta membuat terobosan baru. Dalam rangka mencapai itu beliau dan KKP menerima masukan dari semua stakeholder, memperkuat

komunikasi dan berkolaborasi terutama melibatkan ahli-ahli yang berbasis keilmuan sehingga kebijakan yang dibuat ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya salah satu forum yang kita laksanakan hari ini adalah bagian dari memperkuat komunikasi dan berkolabroasi, kerjasama dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan

- Kegiatan prioritas; memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan stakeholders lainnya, menyederhanakan perizinan, meningkatkan pendapatan, perlindungan dan memperbaiki kualitas hidup nelayan, penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas serta pembangunan pelabuhan perikanan
- Beberapa poin PPJM 5 tahun kedepan diantaranya dari sisi SDM, akan melanjutkan dan memperkuat kegiatan perlindungan asuransi dan bantuan ke nelayan, bimbingan teknis ke nelayan, sertfikasi, asistensi kepada ABK dan pelaku perikanan tangkap, sertfikasi HAM, dan lain-lain. Berkaitan dengan regulasi; Peraturan yang sederhana, perizinan yang cepat, pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis WPP dan semoga semakin mantap kedepan. Dari segi infra struktur; akan dikembangkan pelabuhan unggul, kampung nelayan maju, kita akan membangun pelabuhan perikanan.
- Rincin program; wadah pengelolaan perikanan berbasis WPP dengan mempertimbangkan keragaman dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP. Strukturnya sudah dibuat dan siapa-siapa yang akan mebawahi organisasi ini 5 tahun kedepan
- Lembaga pengelolaan Perikanan adalah ajang antar pusat maupun darah, antar sektor dan stakeholders. Semuanya bersinergi dalam mulai dari data, tata kelola, perizinan kapal, pelabuhan, dan lain-lain.
- Harapan kami pembangunan perikanan tangkap kita baik antar sektor, antar pusat dan daerah 5 tahun kedepan akan semakin sinergi lagi dalam wadah pengelolaan perikanan
- Peraturan yang sederhana dan efektif dan efisien; mensinergikan semua aspek dengan 4 prinsip APBN 5 tahun kedepan, akan mereview 29 aturan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Dimana, 17 diantaranya berkaitan dengan sub sektor perikanan tangkap. Mengenai lobster masih didiskusikan dengan semua stakeholders. Dari 17 aturan minimal kita akan menyederhanakan menjadi 13 saja.
- Kegiatan prioritas lainnya yaitu perizinan yang cepat, on line dan *paperless*. Fungsi pengendalian perizinan masih menjadi hal yang utama. Kita rencanakan maksimal 1 hari bisa diselesaikan dan semuanya online mulai dar pengajuan sampai pencetakanannya. Nelayan dan plaku usaha bisa mencetak sendiri filenya. Dalam waktu dekat akan di-*launching* oleh Pak Menteri berkaitan dengan perizinan online dan *paperless*
- Kapal perikanan pengelolaan yang kompetitif; dokumen kapal, kearsipan, dan lain-lain. Awak kapal terkait dokumen awak, keterampilan, perlindungan, pernyataan, dan lain-lain. Berkaitan dengan data API; penangkapan ikan yang ramah lingkungan, memiliki basis data, penanganan diatas kapal sampai pelabuhan juga menjadi prioritas
- Pelabuhan perikanan yang unggul; sudah di identifikasi apa yang perlu 5 tahun kedepan. Pertama, pelabuhan perikanan menjadi pusat bisnis dan dapat terintegrasi. Kedua, menjamin mutu ikan dan ramah lingkungan dan ketiga menjadi pusat pelayanan bagi pelaku usah dan menjadi sentra yang maju dan akuntabel. Dari 538 pelabuhan perikanan, untuk memenuhi standar dibutuhkan 4,1 T. Selain mengembangkan fisiknya, juga mengembangkan konektifitasnya dengan pembangunan sarana transportasi dan komunikasi lainnya. Terkait infrastruktur akan kami lihat lokasi yang memadai, kebutuhan 2 T terkait pelabuhan perikanan
- Prioritas program prioritas lainnya adalah Kampung Nelayan Maju priortas 5 tahun kedepan khusunya kampung-kampung nelayan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan. Kampungnya akan kami perbaiki, syaratnya dari myoritas msyarakatnya adalah nelayan, sudah ada kelembagaan, dan lain-lain
- Lokasi yang terintegrasi di Bangka Belitung, 2 tahun yang lalu TPI-nya sudah disentuh dan kampung disekitarnya akan diperbaiki
- Pengelolaan perikanan tangkap ZEE dan laut lepas menjadi fokus utama. Apabila kita mampu mengoptimalkan angka 7 T bukan sesuatu yang musthil dari pengelolaan perikanan

- Indikator kinerja utama; produksi perikanan di prediksi kedepan menjadi 8,02 jt ton dan diakhir RPJM menjadi 10,10 jt ton, peningkatan pendapatan nelayan, dan lain-lain
- Untuk total produksi 5 tahun depan kita prediksi capai 6 % dengan komoditas utama TTC
- Ikan dengan nilai ekonomis tinggi menjadi salah satu prioritas kita

Christie Saruan (Kepala Bidang PRL PSDKP Sulawesi Utara) Isue Representasi Gender Dalam Pengelolaan Bersama Perikanan

Saat ini, di Sulawesi Utara, DKP Provinsi mendapatkan dukungan dari DAI/Invest. Dimana project tersebut fokus kepada gender dalam lingkup perikanan. Saat ini, proyek tersebut berada pada 3 wilayah, yaitu Bitung, Manado dan Sangihe.

Dominasi peran dan status secara nasional, 50 % dari total penduduk Indonesia adalah wanita. 55 % hidup dari pertanian termasuk didalamnya perikanan.

Wanita memilki peran ganda. Isu strategis; disintegrasi pembagian kerja perempuan dan laki-laki masih ada, rendahnya pendidikan, keterampilan, kurangnya rasa percaya diri dan kemampuan potensi diri bagi wanita, akses pendidikan, kalau dikampung lebih memprioritaskan laki-laki. Walapun dari sekian anak didominasi oleh perempuan tetapi laki-laki diprioritaskan, wanita kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau rapat, yang hadir lebih banyak perempuan

Definisi gender; mengintegralkan gender dalam satu dimensi integral mylai dari perencanaan sampai pada evaluasi kebijakan program. Harapannya adalah perempuan memiliki akses, partisipasi, control dan pengambilan keputusan.

Kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di Sulawesi Utara; Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap, mengelola ikan diatas kapal, mengumpulkan ikan hasil tangkapan, mengikuti kegiatan pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan, promosi makan ikan, penanaman mangrove dan konservasi

Dukungan pemerintah daerah Sulawesi Utara: komitmen, kebijakan, kelembagaan, keputusan gubernur terkait program pengarus-utamaan gender, pembentukan forum data terpilah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, dan lain-lain

Strategi kedepan; pengembangan teknologi dan peningkatan SDM

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan dan Komentar:

1. Rudiman Wali, nalayan dusun Parigi:
   Saya berterima kasih atas paparan materi dari smua narasumber. Mohon agar semua materi selama beberapa hari ini bisa diberikan kepada kami agar kami bisa memberikan materi itu juga kepada yang lain terutama aturan dan terkait maju bersamamenuju perikanan tuna berkelanjutan
2. Gede Mahendar, PT. Hatfield Indonesia:
   Bagaimana langkah strategis masing-masing instansi baik pusat maupun daerah terkait mitigasi iklim dan terkait pengembangan generasi muda/remaja. Apa langkah pemerintah daerah dan pusat terkait 2 hal tersebut
3. Sindi, Universitas Nusa Cendana:
   saya memberikan apresiasi kepada ibu-ibu dan salut kepada pemerintah karena mampu mendorong aktfiitas perempuan untuk masuk ke sektor ekonomi. Saran saya perempuan didorong untuk mengelola grade ikan yang dibawah standar eksport untuk dipasarkan di pasar local tetapi kelas menengah keatas. Ini bisa menjadi kontribusi, tinggal dikemas dengan baik dan masuk ke hypermart. Jadi perempuannya didorong ke sektor co-produksi.
4. Paudino Usman, Ketua Komite FT Sanana;
   berkaitan dengan paparan materi Bapak terkait sumber daya manusia terkait perlindungan asuransi, bantuan dan bimbingan teknis ke nalayan. Pelaksanaannya kapan?

Jawaban:

Ahmad Furkon:

Pengaruh utama terkait beberapa hal termasuk gender, adaptasi iklim, mitigasi bencana, transportasi digital, pembangunan berkeadilan dan lain-lain masuk dalam rencana kedepan. Terkait gender ada indeks gendernya. Dalam RPJM sudah termasuk didalamnya pengarus utamaan gender. Terkait dengan gender ada indek pembangunan dan pemberdayaannya, angka partisipasi perempuan didalam pembangunan agar pembangunan itu bisa adil marata tanpa melihat jenis kelaminnya.

Berkaitan dengan mitigasi bencana itu juga masuk dalam arus utama. Ada beberapa sub sektor perikanan yang akan berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya terkait pelabuhan perikanan unggul, Kami berharap pembangunan perikanannya yang ramah lingkungan selain memberdayakan nelayan dari segi keterampilan dan pengolahan, juga sebagai pusat informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim. Harapannya pengembangan perikanan unggul ini preventif terhadap bencana dan perubahan ikllim, penggunaan bakar yang ramah lingkungan atau rendah polusinya. Itu beberapa kebijakan terkait mitigasi iklim dan bencana

Pemberdayaan keluarga nelayan termasuk anak-anak dan remaja. Sudah ada di RPJM sebelumnya tetapi harapannya semoga bisa kita kembangkan

Terkait dengan asuransi nelayan, sudah dilakukan dan pemerintah membantu membayar premi asuransinya. Sebelumnya hanya memfasilitasi tetapi sejak 2016 sudah dibiayai untuk sebagian nelayan kecil. Selain asuransi nelayan, difasilitasi juga sertifikasi tanah, permodalan, dan lain-lain. Salah satu yang menarik dari RPJM ini adalah salah satunya *merger project* atau proyek utama terkait perikanan tangkap, yaitu pemberdayaan nelayan dengan biaya 200 T yang merupakan gabungan dengan instansi lainnya seperti Koperasi, KKP dan lainnya dan pembangunan pelabuhan perikanan.

Christie Saruan:

Benar untuk ikan-ikan yang grade ekport masuknya di pabrik. Tetapi ikan grade di bawah itu sudah diupayakan untuk nugget, bakso, shingga bisa masuk ke supermarket. Kalau ada kegaiatan di provinsi ibu-ibu yang demo. Saya memberikan apresiasi kepada MDPI karena ada ibu tibo-tibo terkait pengenalan keuangan, teknologi sehingga petigo2 itu diberikan fasilitas Trafiz sehingga mereka bisa masukan data harga ikan pada saat itu.

Wiwi Yanti A., Bitung: Kami baru beberapa kali mengikuti Trafiz. Selama ini pengalaman tibo-tibo data kami menggunakan manual tetapi melalui Trafiz kami menggunakan android. Apa yang kami beli, kami jual atau hutang itu dicatat didalam aplikasi tersebut. untuk pemasukan, pengeluaran dan untung rugi bisa dilihat di Trafiz. Saya baru tahu tentang gender. Yang saya tahu gender itu kesetaraan perempuan dan laki-laki. Saya minta penjelasan dari ibu lebih jauh terkait gender agar kami tau sejauh mana peran kami sebagai perempuan

Pak Toni, kampung Bajo, Sanana: Terkait Desa Unggulan 5 tahun kedepan. Sekedar informasi di kampung saya, Bajo kecamatan Sula Kabupaten Sanana provinsi Maluku Utara. Banyak nelayan, kampungnya strategis dan dekat pulau. Penghasilannya sangat banyak tetapi kampungnya masih sangat kumuh. Sudah 1 tahun masuk kelompok Fair Trade dan mendapatkan dana premium 1,3 M. kalau bisa masukan Bajo untuk Program Utama Desa Unggulan. Kalau bisa utamakan kampung kami. Jika bersama-sama dengan MDPI, kampung itu akan menjadi kampung unggulan. Mudah-mudahan Bapak Presiden disana bisa dengar.

Nostenli (Koperasi Taruna Selatan Morotai) : Di koperasi kita, kami memberdayakan ibu-ibu nelayan. Mereka kita latih juga kerjasama dengan dinas sehingga bisa produktif seperti mengolah ikan menjadi nugget, abon. Kami minta bantuan sertifikat Badan POM agar bisa jual produk mereka ke supermarket dan kalau bisa dibuat link ibu-ibu kreatif

Salman : Terkait materi bapak, terwujudnya keragaman hayati yang terjaga, kalau kita mau jaga masalahnya adalah sampah. Sampah di laut sangat banyak. Saya orang laut yang mancing di laut.

Mungkin ratusan atau juta ton sampah di laut. Kalau kita sudah memenuhi persyaratan Desa Maju, yaitu bersih, maju dan nyaman kemana kita harus ajukan apakah ke pemerintah pusat atau daerah

Sri, Supplier Sangihe: Saya hanya menyampaikan keluhan teman-teman kami dilpangan terkait es batu. Di kabupaten kami tidak ada pabrik es, hanya menggunakan es rumahan yang menggunakan plastik dan berpengaruh ke polusi. Kami mengahrapkan bantuan pemerintah untuk membangun pabrik es di kabupaten kami. Sudah ada bantuan pabrik es mini tetapi esnya cepat cair dan tidak bisa dibawa ke laut

Yitna, Sangihe: mengenai aplikasi Trafiz terkendala dengan jaringan. Kami ingin ada jaringan, apakah pemerintah bisa memfaslitasi jaringan. Kami mengharapkan agar perempuan juga bisa menggunakan aplikasi tersebut

Muhamad Umarella: di UU 2003, kewenangan Pemerintah Pusat memberikan izin kepada kapal diatas 30 GT sedangkan Pemerintah Provinsi memberikan izin kepada kapal dibawah 30 GT. Sekarang kenapa harus membangun kapal 30 sampai 40 GT. Kenapa tidak dibawa ke daerah

Jawaban:

Furkon;

- Kampung nelayan Bajo. Sudah kami catat dan Maluku Utara salah satu provinsi yang sangat pro-aktif. Masukan saja proposalnya, nanti kordinasikan dengan daerah.
- Terkait sertifikat Badan POM, akan kami fasilitasi.
- Terkait keanekragaman hayati mengenai sampah sudah menjadi isu nasional. Di periode terdahulu kita sudah bagus mengkampanyekan dan 5 tahun kedepan juga demikian.
- Untuk ibu Sri sudah kami catat tolong dibuatkan proposal ke dinas kabupaten dan selanjutnya ke Provinsi. Terkait jaringan, ada kementerian yang menangani yaitu komeninfo ada program bakti, akan kami kordinasikan dengan kementerian yang lain.
- Sebelumnya kita sudah melakukan beberapa pendekatan dan di tahun 2014 kita sudah melakukan pendekatan GT dimana sudah dilakukan daerah baik kabupaten maupun provinsi namun terkendala dengan kapalnya tidak bisa dibangun dan lain-lain. Itu menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk pada 5 tahun terkahir kita mencoba formula yang berbeda dan juga telah melakukan evaluasi. Ini menjadi masukan bagi kita, untuk 5 tahun kedepan arahnya seperti apa

Cristie: menyurat aja ke BPOM. Kalau produk nelayan atau petani. Untuk pabrik es saya sangat mendukung.

Panel Diskusi Sesi II

1. Update SIMKADA, Muhamad Idnillah (DJPT-KKP)

Simkada merupakan sistem informasi untuk integrasi antara daerah dan pusat. Awalnya dimulai tahun 2015, kita melihat di daerah khusunya sesuai kewenangan di daerah sudah ad aplikasi ada yang manual. Bagaimana data ini terintegrasi. Memang kewenangan ini sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Dengan adanya UU 23 tahun 2014, kewenangan pengelolaan laut sampai 12 mil kewenangan di peropinsi. Kami dipuast mengintegrasikan perizinan melalui SIMKADA kita optimalkan di seluruh Provinsi. Masing-masing punya metode dan kewenangan penuh. Satu yang istimewa yaitu di aceh yang milik kewenangan sendiri terkait peizinan sedniri karena tidak ada batas untuk perizinan kapalnya. SIMKADA itu adalah bagaimana semua daerah kita koordinasikan izinnya. Masing-masing kepala daerah pasti mempunya program untuk membuat aplikasi. Di Jawa Barat itu ada namanya si cantik. Namun sekarang aplikasi-aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan SIMKADA sehingga data di pusat Alhamdulillah bertambah.

Jika dibandingkan dengan data statistik memang masih jauh. Total kapal 173.000 yang memiliki izin baik BPKP maupun SIUP/SIPI, di pusat kapal yang berizin total 10.000 sisanya kapal di daerah. Jadi begitu besarnya jumlah kapal yang diurus di daerah. Di dalam UU no. 23 disebutkan terkait dengan kewenangan yang sampai sekarang belum ada aturan dibawahnya. Salah satu kendala, kabupaten kota tidak punya kewenangan untuk perizinan. Provinsi sudah membuat kantor cabang dinas. Di Sulawesi ada 7 plus 1. Kita mngkordnasikan smua provinsi selain perizinan terkait juga dengan andon. Ada daerah yang ditandatangani provinsi ada juga yang ditandatangani kabupaten/kota. Ini yang akan kita integrasikan menjadi satu. Kapal-kapal yang melakukan penangkapan diatas 12 mil dan dibawah 30 GT pake izin pusat. Kendala berikut terkait ukuran, angka 5 GT, 7 GT dan 10 Gt khusus nalayan kecil. Konsep UU baru nanti tidak ada ukuran nanti akan muncul di peraturan pemerintah.

Kami memiliki SIMKADA online dan sistemnya bisa diakses teman-teman di daerah. Di SEA project, ad SIMKADA offline kami aplikasikan ke WPP 715 dan 718 kalau tidak salah. Aplikasi SIMKADA ini akan memberikan pelayanan secara online terkait perizinan baik pusat maupun daerah. Untuk dipusat sudah jalan dari hari senin, dan sejam itu izin sudah bisa selesai. SIMKADA offline, petugasnya bsa memberikan izin memakai sistem offline dulu, setelah ada sinyal akan masuk ke database SIMKADA di pusat.

Maksud dan tujuan SIMKADA: menyediakan sistem basis database, Integrasi prizinan data perikanan secara nasional. Kami berharap kapal yang sudah berizin ini kita jadikan basis data untuk statistik. Selama ini data statistic itu tidak ada *by name by address*. Kami berharap pada saatnya nanti, semua kapal baik yang menggunakan bukti pencatatan kapal, SITU/SIPI itu sudah masuk kedalam database maka data statistic akan merekam itu. Selain itu tujuannya untuk standarisasi perizinan. Aapa yang ada dalam tagihan, itu saja yang dibayar. Pusat Sentara Nelayan untuk kita jadikan bbm bersubsidi belum kita petakan. Perhitungan BBM subsidi untuk kapal dibawah 30 GT. Kami ingin pusat dan daerah dinamis dalam melayani. Kalau izin pusat, bapak hanya PHP dan tidak ada untuk pembayaran lain-lain. Setelah sekian hari itu yang akan bapak2 terima. Itu yang kami inginkan antara pusat dan daerah.

Standarisasi izin: di tahun 2015 izin daerah itu menggunakan no surat. Nah kami standarkan dari pusat sampai daerah.

Perkembangan SIMKADA; dari 2015 sampai skarang sudah ada perkembangan dan kendala terkait operasional di lapangan, masalah andon, dan lain-lain

Data SIMKADA

SIPI – SIKPI dan SIMKADA; alat tangkap dalam simkada satu kapal bisa 2 alat tangkap. BPKP untuk kapal kecil. Kami filter alat tangkap tuna di simkada. Untuk handline Tuna bisa tangkap dasar. Kami coba mnegintegrasikan bukan untuk mengabaikan kewenangan tetapi mengkoordinasikan kewenangan di daerah agar nelayan kecil ini juga bisa nyaman.

2. Update DIVA-TUNA, Riana Handayani (DJPT-KKP)

R-VIA berubah menjadi DIVA-TUNA memuat daftar atau informasi kapal untuk SIPI dan BPKP yang melakukan penangkapan tuna. Tersistematis dengan data pusat yang izin kapalnya diatas 30Gt. DIVA Tuna sebagai user untuk menarik kapal-kapal tuna dari SIMKADA. Pentingnya bapak ibu mendaftarkan kapal dengan dara yang lengkap karena terkait ketertulusran. DIVA Tuna bisa diakses oleh publik nasional dan internasional terkait kapal yang sudah teregistrasi. Kalau di WCPFC daftarnya bagi kapal yang di 717 dan buyer bisa mengakses data kapal di 715 tanpa kapal-kapal tersebut harus mendaftar di WCPFC. Data base ini dibangun untuk memuat infomasi untuk keperluan WPPNRI bagi kapal di 715, 714, 713

Kendala belum ada data jelas berapa jumlah kapal. Harapannya SIMKADA bisa menjawab itu. Di bulan Januari akan launching dan Februari 2020 akan ada training. Kami berharap Daerah memasukan data kapal di laman tersebut. Salah satu diva tuna juga support data rumpon. Karena rumpon berkaitan dengan alat tangkap tuna, maka berharap data rumpon juga bisa dimasukan ke dalam laman diva tuna. Kami sudah mengedarkan surat ke daerah terkait petugas data rumpon, Riau, Nabire, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.

Hasil analisa data rumpon untuk revisi permen 26 agar tepat sasaran. Untuk itu kami perlu data sekomperehnsif mungkin. Harapannya daerah untuk segera memasukan nama2 petugasnya

3. Update Pelaksanaan Log Book Dan atau E-Log Book Untuk nelayan Kecil oleh Ilham

- Dasar hukum UU no 45 tahun 2009 dan aturan turunannya
- Log book penagkpan ikan adalah laporan harian nelayan/nakhoda terkait apa yang ditangkap atau tangkapan lain misalnya hiu itu juga dicatat
- Permen mengatur bahwa jika tidak isi log book maka akan ada pencabutan SIPI
- Pengenalan aplikasi e-logbook

4. Pengenalan I-Fish Database System oleh Timur (MDPI)

- Silahkan melihat hasil presentasi.
- Karena berbasis wawancara, kadang-kadang nelayan marah.
- Ada juga nelayan yang takut untuk mengatakan mereka menangkap hiu karena takut bisa ditangkap oleh pihak berwenang. Adanya partisipasi mahasiswa dalam pengumpulan data

SESI TANYA JAWAB:

Pertanyaan Sesi I:

1. Sidik: terkait SIMKADA, seberapa besar porsi LSM untuk membantu Pemerintah Pusat dan daerah dalam melakukan pendataan kapal perikanan khususnya dibawah 30 GT
2. Muhamad Umarela: rencana revisi terkait Permen untuk perbahan alat tangkap. Saya usulkan pemberlakukan 2 alat tangkap

Jawaban:

1. Terkait kewenagan merupakan kewenangan daerah. Kendala terkait penerbitan. Dulu masih bisa diterbitkan oleh dinas perhubungan laut. Namun sekarang, oleh dirjen perhubungan laut enath KSOP. Itu kenapa kapal kecil ini belum memiliki izin. Juga terkait kondisi geografis.
2. Untuk ibu Sinta, masalah Tuna terkait SIMKADA belum ada izin pusat
3. Terkait revisi nelayan hanya memiliki 2 alat tangkap akan kami diskusikan. Dari sisi waktu tidak amsalah tetapi apakah dari pelaku usaha bisa

Terkait otoritas kapal ada di Pak Moh. Diva Tuna adalah sebagai salah satu pengguna data. Data di Diva tuna akan kami anlisi lebih lanjut. Lebih banyak data terkait rumpon sangat penting untuk mempermudah analisa kami

Pertanyaan Sesi II:

1. Haruna, Unpatti: Sya kira ini pekerjaan besar untuk pengelolaan perikanan tuna. Bagaimana kita mngkover data dan semua berbcara data. Kita sudah melakukan kajian terkait pemanfaatan tuna di seram dan banda. Untuk banda karena ketat. Bagaimana meng-*cover* data itu. Dari segi

pemanfaatan nelayan kecil diatas 12 mil, kadang yang ditemui ada konflik antara nelayan kecil dan besar dari segi penempatan rumpon. Nelayan diatas 30 GT kadang masuk ke wilayah perairan 12 mil. Memang sudah ada pengawasan, saya kira antisipasi kedepan dipertajam lagi dari segi pengawasan dan kontrol. Hal terpenting yaitu menyatukan data agar pengelolaan perikanan itu semakin lengkap

2. Anita, DKP NTT: Kami dari dinas, aplikasi SIMKADA lancar. Di DPM-PTSP tidak berjalan baik. Data yang ditampilkan 700 SIPI itu tahun 2016 -2017. Laporan satu pintu berbeda dengan DKP. Alasannya karena tidak ada gross-akte nya dan lain-lain. Sampai sekarang belum bisa input SIMKADA. Bisakah Pemerintah pusat mengkoneksikannya dengan e-log book juga pelaporan data tuna terkoneksi dengan DIVA tuna?
3. Lalu Adi: Kantor kami dilempar karena perizinan. Kita terlena dengan regulasi. Bagaimana sich memberikan perizinan yang efektif kepada nelayan kita. Kalau dilaut, nelayan langsung ditangkap. Perizinan di NTB dilakukan di pusat kota di Mataram. Jarak antara mataram dan 12 jam perjalanan. Kami dari dinas kelautan mencoba instrument baru mellaui pergub sehingga nanti nelyan kecil melakukan pemberkasan cukup di pelabuhan perikanan KSOP pun memperifikasi di sana. Tidak ada lagi urusan dipusat Kota. Kerjasama antar lembaga, selama in ad rezim kkp dan perhubungan. Bisa tidak dipotong ratanya. Tawaran saja bagaimana kita meberikan pelayanan terutama kepada nelayan kecil bisa memberikan akses yang lebih mudah bagi mereka.
4. Nurliah, Universitas Mataram: kalau ada data yang ganjil akan diverifikasi. Apakah ada SOP yang diberlakukan KKP menyangkut validasi data. Sebagian data diisi secara sukarela oleh nelayan, pemilik kapal dan observer. Apakah ada waktu-waktu tertentu langsung di cek di sumber data atau hanya dilihat di angka ganjil-ganjil itu. Ini penting bagi kami untuk melihat prosedur validasi data tersebut. Kadang-kadang data di nelayan berbeda dengan observer, maka saya ingin mengetahui bagimana SOP validasi
5. Pak Far-Far: kalau di daerah sesuai PerPres izin budidaya ke penanaman modal dan PTSP. Tetapi saya lihat d KKP izin budidaya di berikan ke penanaman modal. Apakah boleh atau ada co-menejemen dengan penanaman modal. Saya pernah alami kasus dg nalayan sulawesi uatara. Sering Dia mlkukan penangkapan di wilayah Maluku. Kapal sudah dapat izin pskp kndari di 714 tetapi yang bersangkutan masuk ke parairan Maluku diluar 714. Diminta bikin izin di PTSP Maluku. Ketika dikordinasikan ke Pusat, diminta dibekukan dulu yang di kndari dan setlah itu Maluku akan mngeluarkan izin. Ini bagaimana? Kita ini hadir untuk melayani nelayan, jangan dibuat repot
6. Pak Trian: akan Bagaimana caranya dia dapat izin di PTSP Maluku bukan ke KKP. Ketika diakses nomor izin itu dari Gambir. Di Daerah, aplikasi itu harus dipikirkan lagi karena masalah jaringan. Di daerah pake SIMKADA sesuai petunjuk ibu menteri.

Jawaban

Ilham:

1. Apakah DIVA tuna ini sudah tersambung dengan data log book? → Sudah tersambung
2. Terkait data yang menangkap di Seram dan lainnya bisa dicek di log book
3. Ada SOP validasi data. Kita koreksi, misalahnya ada data tuna jenis apa gitu ditangkap di daerah tertentu itu kami croscek apakah benar tuna itu ada di perairan tersebut.
4. Arahan pak Menteri, izin dipermudah tetapi pengawasan diperketat. Data yang diberikan kepada kami adalah tanggung jawab penuh pemohon
5. Terkait hasil tangkapan, prosesnya ada di log book karena ada di fashing ground. Biasa jadi pada saat input log book datanya belum pasti karena hanya estimasi.
6. Kalau mengenai izin mungkin mengenai andon

Trian:

Harus diperjelas mengenai penomoran surat izin berkaitan dengan budidaya ikan.
Kadis Maluku: Kapal sudah dapat Izin PTSP Kendari di 714 tetapi yang brsangkutan masuk ke parairan Maluku diluar 714. Diminta bikin izin di PTSP Maluku. Ketika dikordinasikan ke Pusat, diminta dibekukan dulu yang di Kendari dan setlah itu Maluku akan mngeluarkan izin.
Trian: akan kami perbaiki.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Bahwa Pertemuan Regional Ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna *(Tuna Fisheries Co-Management Committee*) telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 18-19 Desember 2019. Pertemuan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dihadiri oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Perwakilan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut, Perwakilan eselon II terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan dari 7 (Tujuh) Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan dari 11 Kab/Kota, nelayan, supplier/pengumpul, industri pengolahan, akademisi dari 7 (tujuh) Universitas , LIPI, USAID, Walton Family Foundation, The David and Lucille Packard Foundation, Yayasan MDPI, AP2HI, IPNLF, EDF Indonesia, MSC Indonesia, YKAN, WWF Indonesia, SFP, LINI, WCS, Fair Trade USA, dan PT. Hatfield Indonesia.

Pertemuan bertujuan untuk (i) Mensosialisasikan kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Indonesia (RPJMN 2020-2024), (ii) Mensosialisasikan kebijakan dan rencana kerja pengelolaan perikanan tuna 2020-2024, (iii) Mendapatkan informasi terkini tentang pelaksanaan logbook dan/atau e-logbook untuk nelayan kecil, SIMKADA dan DIVA-Tuna, (iv) Mencari potensi solusi terhadap 6 (enam) tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan nelayan, dan (v) Pengenalan isu gender di sektor perikanan dalam Pengelolaan Bersama Perikanan Tuna di Provinsi Sulawesi Utara (sebagai *pilot project*), serta (vi) melaporkan capaian arahan program dalam Kesepakatan Bersama antara MDPI dan KKP.

Berdasarkan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, paparan narasumber, dan hasil diskusi yang berkembang, maka pertemuan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan perikanan tuna di tingkat provinsi dan regional agar dapat dilaksanakan secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait upaya yang diperlukan dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan perikanan tuna.

2. Tantangan-tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan tuna di wilayah kerja 6 (enam) provinsi meliputi: (i) ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan baik dari segi volume maupun harga yang terjangkau, (ii) masih adanya nelayan yang belum mendapatkan Kartu Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), (iii) pembentukan KUB dan koperasi nelayan, (iv) pengaturan pemanfaatan rumpon, (v) penerbitan dokumen kapal seperti Pas Besar maupun Pas Kecil dan (vi) penerbitan buku kapal perikanan dan penandaan kapal perikanan untuk kapal ukuran 30 GT ke bawah.

3. Terhadap kendala yang dihadapi nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi, permasalahan yang dihadapi antara lain:
   a. Nelayan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas setiap kali akan membeli BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan masa berlaku dan kuota rekomendasi untuk setiap kapal ikan.
   b. Terbatasnya kuota BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dari Pertamina di SPBN sehingga tidak mencukupi kebutuhan nelayan. Disamping rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga BBM menjadi tinggi.
   c. Lokasi SPBN jauh dari tempat pendaratan nelayan dan mekanisme penyaluran yang belum tepat sasaran juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi nelayan saat ini.
   d. Lambatnya tindak lanjut pertamina dalam merespon rekomendasi perizinan SPBN.

4. Terhadap pelaksanaan Program KUSUKA sebagai identitas pelaku utama perikanan masih mengalami kendala antara lain:
   a. Proses pendaftaran dan aktivasi KUSUKA yang dianggap rumit.
   b. Jaringan infrastruktur seperti listrik dan internet yang menghambat dalam proses input data.
   c. Kurangnya sosialisasi KUSUKA.

d. Permohonan pendaftaran sudah banyak yang divalidasi oleh KKP, akan tetapi sampai saat ini masih banyak Kartu KUSUKA yang belum terbit untuk nelayan tuna.
e. Petugas Penyuluh belum efektif dalam mendampingi nelayan kecil untuk memperoleh KUSUKA.
f. Terdapat permasalahan di lapangan dimana status pekerjaan pada KTP berdampak pada proses validasi KUSUKA di daerah.

5. Kendala terhadap KUB dan Koperasi Nelayan adalah:
   a. Masih banyaknya KUB/Kelompok Nelayan yang belum berbadan hukum maupun menjadi Koperasi, sehingga sulit melaksanakan transaksi bisnis dengan badan usaha yang berbadan hokum.
   b. Pengembangan permodalan usaha sulit dilakukan khususnya dalam mengakses lembaga perbankan/pembiayaan karena adanya persyaratan legalitas kelembagaan.
   c. Jumlah minimum anggota 20 orang sebagai sarat pembentukan Koperasi Nelayan, hal ini dirasa sulit untuk dipenuhi.
   d. Jika nelayan tidak dibantu dalam hal ini, maka nelayan kesulitan memperoleh bantuan dari Pemerintah karena diperlukan KUB/Kelompok Koperasi sebagai syarat untuk mengakses bantuan dari Pemerintah.
6. Kendala terhadap pemanfaatan rumpon, antara lain:
   a. Banyaknya rumpon yang dimanfaatkan oleh nelayan namun tidak berizin, hal ini menandakan bahwa pelaksanaan peraturan terkait Permen KP No. 26 tahun 2014 tentang Rumpon sulit diimplementasikan di lapangan.
   b. Nelayan mengalami kesulitan teknis terkait aturan rumpon misalnya dalam memperkirakan jarak antar rumpon dan menyampaikan informasi koordinat rumpon karena bersifat rahasia bagi nelayan.
   c. Aturan tentang rumpon belum bersinergi dengan RZWP3K di provinsi.
   d. Upaya pendaftaran ulang rumpon sudah dilakukan sejak tahun 2015, namun tidak berjalan dengan baik.
   e. Rangkaian pertemuan terkait rumpon telah dilaksanakan di tahun 2017 untuk membahas pemetaan wilayah potensial pemasangan rumpon di WPPNRI dan menyusun draft peraturan untuk pendataan rumpon serta revisi permen KP No. 26 tahun 2014 tentang Rumpon.
7. Kendala terhadap penerbitan Pas Kecil, antara lain:
   a. Telah ada perjanjian kerjasama antara KKP dan Kemenhub dalam penerbitan Pas Kecil untuk kapal serta dokumen SKK 30 & 60 mil dan buku pelaut untuk nakhoda melalui program gerai terpadu. Namun program gerai terpadu ini belum menjangkau di tingkat daerah.
   b. Penerbitan pas besar dan pas kecil masih mengalami kendala karena keterbatasan petugas ahli ukur dan sebaran lokasi kapal yang luas dan berjarak cukup jauh dari lokasi KSOP/UPP.
   c. Jumlah nelayan yang banyak, serta masih kurangnya pemahaman akan pentingnya kelengkapan dokumen kapal yang diperlukan selama melakukan penangkapan ikan di laut dan kurangnya koordinasi lintas sektor.
8. Kendala terhadap pendaftaran kapal dan penandaan kapal Perikanan berizin daerah 30 GT kebawah, antara lain:
   a. Proses penerbitan Buku Kapal Perikanan di Daerah belum seluruhnya berjalan dengan baik.
   b. Petugas yang telah dilatih dalam menangani buku kapal di daerah sudah tersebar di posisi tugas yang lain.
   c. Proses pengurusan perizinan cukup rumit, karena multi sektor dan lokasi yang sulit dijangkau.
   d. Permohonan rekomendasi pembuatan kapal Perikanan belum berjalan.
   e. Mekanisme penomoran untuk *vessel identification number* untuk kapal 30 GT kebawah belum jelas apakah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Hal-hal lainnya yang didiskusikan di dalam pertemuan antara lain:
   a. Terbatasnya ketersediaan es balok untuk menjaga kualitas hasil tangkapan pada saat operasi penangkapan ikan di beberapa daerah.
   b. Banyaknya sampah di laut berdampak pada kualitas lingkungan dan sumber daya ikan.

c. Masih banyaknya desa-desa yang kumuh dan tertinggal dari sisi infrastrukturnya.
d. Perlunya meningkatkan dukungan peran perempuan di sektor kelautan dan perikanan.
e. Gerai perizinan belum menjangkau kapal-kapal yang tersebar di daerah-daerah terpencil dengan jarak yang jauh dan waktu tempuh lama.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi, pertemuan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertemuan FCMC ditingkat provinsi dan ditingkat nasional perlu terus dilakukan dalam mendiskusikan tantangan yang dihadapi nelayan dengan menyusun rencana aksi bersama untuk bersama-sama mencari potensi solusi. Hasil pertemuan agar disampaikan juga kepada KKP sebagai upaya yang diperlukan dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan perikanan tuna. Waktu pertemuan selanjutnya diusulkan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 agar mempermudah penganggaran di Pemerintah Daerah.
2. Merevisi peraturan yang menimbulkan masalah bagi nelayan dalam memperoleh BBM bersubsidi seperti Permen KP No 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap.
3. Memaksimalkan peran penyuluh perikanan dalam pendampingan dan sosialisasi program-program pemerintah seperti KUSUKA, Sistem Informasi Kapal Izin Daerah (SIMKADA), dan Log Book Penangkapan Ikan kepada nelayan kecil khususnya nelayan tuna yang berlokasi di daerah terpencil. Melakukan MOU dengan Universitasersitas untuk KKN Tematik agar Mahasiswa dapat melakukan pendampingan kepada nelayan-nelayan di daerah terpencil.
4. Mendorong pembentukan KUB atau koperasi serta memperkuat KUB melalui bimbingan teknis antara lain terkait pengelolaan keuangan, akses ke perbankan, dan menghubungkan akses nelayan ke pengusaha.
5. Mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur di daerah seperti jaringan listrik dan internet untuk mendukung operasionalisasi kegiatan perikanan dan proses pengumpulan data perikanan. Perlu penguatan infrastruktur khususnya untuk menjawab kendala telekomunikasi dalam proses aktivasi KUSUKA. KKP diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan K/L terkait.
6. Menjalin kerjasama dengan Kominfo dan Telkomsel/Indosat untuk memperluas jaringan internet hingga ke daerah terpencil yang jauh dari kabupaten/kota, sehingga akses untuk menginput data kenelayanan bisa tercapai.
7. Melakukan pendataan rumpon yang sudah dipergunakan oleh nelayan dan mengkaji peraturan rumpon yang sudah ada.
8. Membuka akses data perikanan dari KKP kepada Pemerintah Daerah, Akademisi dan pelaku usaha terkait sehingga dapat digunakan dalam proses analisis dan penyampaian rekomendasi untuk kebijakan pengelolaan perikanan.
9. Melakukan pendataan rumpon untuk mengetahui jumlah rumpon yang sudah terpasang. Pendataan rumpon dilakukan secara sukarela oleh para pemilik rumpon yang dikoordinir oleh dinas-dinas dan LSM/asosiasi perikanan melalui aplikasi DIVA-TUNA. Data tersebut akan dianalisa dan di-*overlay* dengan kajian riset untuk menentukan rumpon yang layak untuk diterbitkan izinnya untuk selanjutnya diterbitkan izin rumpon (SIPR). Selain itu, direkomendasikan untuk melakukan revisi Permen KP tentang rumpon. Penerapan konsep perikanan rumpon berkelanjutan misalnya melalui penutupan penangkapan ikan di rumpon untuk waktu tertentu, pengaturan mata jaring dan mata pancing untuk menghindari tertangkapnya juvenile tuna.
10. Mendorong KKP dan Pemerintah Daerah agar bekerjasama lebih intensif dengan KSOP (Kemhub) untuk melaksanakan gerai terpadu dalam rangka percepatan penerbitan Pas Kecil dan Pas Besar.
11. Mendorong peran perempuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing dan pemasaran produk perikanan agar dapat masuk ke pasar menengah ke atas. Pelatihan bagi perempuan dalam menggunakan perangkat teknologi yang dapat mempercepat proses pemasaran produk perikanan.

12. Meningkatkan peran serta anggota komite dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati.
13. Menyediakan materi berupa buku/video, poster, leaflet yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di perpusatakaan desa sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat dalam hal pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
14. Menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Laporan dan Pengantar Singkat Pertemuan Regional FCMC oleh Direktur Ekskutif MDPI (Kiri) dan Pengantar Kegiatan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Kanan)

Menteri Kelautan dan Perikanan-RI Bapak Edhy Prabowo memberikan arahan sekagus membuka kegiatan dengan resmi (kiri) dan acara serah terima cendramata dari nelayan kecil kepada KKP (kanan)

Penyampaian arah Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan perikanan tuna 2020-2024 oleh Plt. PSDI (kiri) dan Diskusi panel terkait isu Koperasi Nelayan, Kartu KUSUKA dan BBM Subsidi untuk Nelayan Kecil oleh perwakilan KKP dan DKP Provinsi (kanan)

Panel diskusi terkait isu pemanfaatan rumpon, BPKP, Pendaftan dan Penandaan Kapal, dan Penerbitan Pas Kecil (kiri) dan Isu Gender dalam pengelolaan perikanan (kanan)

Proses diskusi peserta pertemuan yang begitu aktif dan kritis

Panel Diskusi untuk mendapatkan update e-logbook, SIMKADA, DIVA-Tuna dan I-fish Database system (kiri) dan Peserta Pertemuan masih terus semangat sampai hari ke-2 dalam menyusun rekomendasi

Lampiran 2. Agenda Kegiatan

Hari I, Rabu, 18 Desember 2019

Waktu	Kegiatan	Ket.	Penanggung Jawab
08.00-08.30	Registrasi Peserta		Panitia
08.30-08.40	**Pembukaan Kegiatan:** • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Do'a		MC Roys
08.40-08.55	Pengantar MDPI		**Saut Tampubolon** (Direktur Eksekutif MDPI)
08.55-09.05	Pengantar Dirjen Perikanan Tangkap		**M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc.** (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap)
09.05-09.30	Arahan dan Pembukaan		**Edhy Prabowo, S.E., M.M., M.B.A** (Menteri Kelautan dan Perikanan)
09.30-09.45	Penyerahan Cinderamata oleh Nelayan Tuna kepada Bpk Menteri		Panitia
09.45-10.10	Foto Bersama & Rehat Kopi		Panitia
Panel Diskusi			
10.10-11.00	Kebijakan pembangunan perikanan tangkap di Indonesia (RPJMN 2020-2024)	15 menit,	**Ukon Ahmad Furkon, S.T., M.T** (Kepala Bagian Program)
	Arah Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan perikanan tuna 2020-2024	15 menit	**Syahril Abd. Raup, S.T., M.Si.** (Plt. Direktur PSDI)
	Tanya Jawab	20 menit	Moderator: **Trian Yunanda S.Pi., M.Sc.,** (Kasubdit ZEEI dan Laut Lepas)
Panel Diskusi **Tantangan dalam Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tuna**			
11.00-12.30	1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi Nelayan	Masing-masing 10 Menit	DKP Provinsi Sulawesi Selatan
	2. Proses penerbitan KUSUKA		DKP Provinsi Maluku
	3. Kebijakan BBM bersubsidi untuk nelayan skala kecil		DKP Provinsi Maluku Utara
	4. Proses, Alur Pembentukan KUB/Koperasi dan Manfaatnya		Direktorat Perizinan dan Kenelayanan DJPT KKP
	5. Tata Cara Penerbitan KUSUKA dan Manfaatnya		**Dhina Arriyana, S.Si.** (Kasubbid Standarisasi Data)
	6. Alokasi BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil dan Perizinan SPDN		**Christie Saruan** (Kasubdit Pelabuhan Perikanan Pantai)
	Tanya Jawab	30 Menit	Moderator: **Hary Christijanto, A.Pi., M.Sc.** (Fungsional Madya P3T)
12.30-13.30	**ISHOMA**		
Panel Diskusi **Tantangan dalam Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tuna**			

13.30-15.00		Masing-masing 10 Menit	
	1. Pemanfaatan Rumpon		DKP Provinsi NTB
	2. Progress Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)		Wildan (MDPI)
	3. Pendaftaran Kapal Perikanan (Buku Kapal Perikanan) dan Penandaan Kapal Perikanan untuk Kapal Sampai dengan 30 GT		DKPD Provinsi Sulawesi Utara
	4. Penerbitan Pas Kecil atau Pas Besar Kapal Perikanan.		DKP Provinsi NTT
	5. Kebijakan tentang Rumpon		**Syahril Abd. Raup, S.T., M.Si.** (Plt. Direktur PSDI)
	6. Pendaftaran Kapal Perikanan (Buku Kapal Perikanan) dan Penandaan Kapal Perikanan		Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT KKP
	7. Fasilitasi Penerbitan Pas Kecil atau Pas Besar Kapal Perikanan.		Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut
	Tanya Jawab	30 Menit	Moderator: **Aris Budiarto, S.Pi., M.Si.** (Kasi Pemantauan PSDI)
15.00-15.15	Rehat Kopi		
15.15-15.30	Penyampaian rencana kegiatan hari kedua.		Panitia
19.00-21.00	Pertemuan Tim Perumus di Hotel.		Plt. Dir. PSDI Kasubdit ZEEI dan LL Putuh Ilham Aris Perwakilan DKP MDPI

Hari II, Kamis, 19 Desember 2019

Waktu	Kegiatan	Ket.	Penanggung Jawab
08.00-08.30	Registrasi Peserta		Panitia
08.30-09.15	Pengenalan: Isu representasi gender dalam Pengelolaan Bersama Perikanan di Sulawesi Utara (Pilot Project) Tanya Jawab	25 menit 20 menit	**Christie Saruan** (Kepala Bidang PRL PSDKP Sulawesi Utara) Moderator: **Dr. Besweni**
Panel Diskusi			
09.15-11.00	1. Update pelaksanaan logbook dan/atau e-logbook untuk nelayan kecil	Masing-masing 15 menit	**Ilham, S.Pi. M.Si.** (Kasi Analisis PSDI)
	2. Update SIMKADA		Dit. PDK
	3. Update DIVA-Tuna		**Riana**
	4. Pengenalan I-fish dan Traceability System	45 menit	**Putra Satria Timur** (MDPI)

	5. Tanya Jawab		Moderator: **Novia (PDK, DJPT)**
11.00-11.15	Rehat Kopi & Teh		Panitia
Panel Diskusi **Potensi Solusi terhadap 6 (enam) Tantangan dalam Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tuna**			
11.15-12.30	Perumusan Hasil dan Diskusi: • KUB dan Koperasi • BBM Bersubsidi • KUSUKA		**Syahril Abd. Raup, S.T., M.Si.** (Kasubdit Pemantauan dan Analisis PSDI)
12:30-13:30	**ISHOMA**		
13.30-14.45	Perumusan Hasil dan Diskusi: • Rumpon • BKP dan Penandaan Kapal Perikanan • Pas Kecil/Pas Besar		**Trian Yunanda S.Pi., M.Sc.** (Kasubdit SDI ZEEI dan Laut Lepas)
14.45-15.00	Pembacaan Rekomendasi		**Trian Yunanda S.Pi., M.Sc.** (Kasubdit SDI ZEEI dan Laut Lepas)
15.00-15.15	**Penutupan**		**Plt. Direktur PSDI-KKP**

Lampiran 3. Daftar Hadir Peserta

18 Desember 2019

ATTENDANCE LIST

ACTIVITY : FCMC Reg. II Jakarta (GMB IV)
DATE : 18/12/19
PLACE : KKP. GMB IV / 15th floor

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
1	Mr	Buyung Radjiden	DKP Prov Malut	buyungradjiden@gmail.com	081319031555	
2	Mr	ABDULLAH A	Dkp [illegible]		085291300560	
3	Mr	FEBRIAN BUDIANTO	DKP SULSEL	febrianbudianto@	08124270144	
4	Mr.	Syaiful [illegible]	DKP Sul-Sel	upulislam63@gmail.com	082347004401	
5	Mr	AZIS	DKP Kab. Lotim	cavaniqiyadong2012@gmail.com	085239507097	
6	Mr	Alfret. L	FPIK Unsrat	a.luasunaung@unsrat.ac.id	082187247893	
7		Sayan	SuFLAYER			
8	Ms	Murliah	Univ. Mataram	libuhari@gmail.com	081342603473	
9		SARNO				
10		ANASRINI HI HAMDAH	TERNATE		08114332306.	
11		Salman Adam	Ternate.		081356460686.	
12		SAHRIL ALI				
13		Encang	[illegible]			
13	Mr.	HARUNA	UNPATTI AMBON	haruna.unpatti@gmail.com	081247758894	
14	Mrs	Husri. Mododahi	Suplayer, Sangihe		082192615888	
15	Mrs	Yetna Bawoel	Splayer Sangihe		081355571380	
16	Mrs	ROSATI HIJAN	Suplayer		081340274954	
17		IDRIS	NELAYAN		085 333 618	
18	Mr	Efraim Luuentut	Suplayer.	efraimluuentut1999@.com	081342679468	
19		Wiwi YANTY ANDAKI	Tibo-Tibo		081355418914	
20		ISRA VALEURU			08534304	
21		LA TOHCA	NELAYAN	SERAM MAL-TENG	081240791394	
22		AGUSALIM	DINAT		082345640877	
23		HASBULLAH	SUPLAYER		085397827792	
24		MASITA LOHOR	DKP MOROTAI	lohormasita@.com	081341527893	

25		ENDANG. DAHLAN	SUPLAYER		085240243950	
26		AHDIAT. M. TAHIR	DKP PROV NTB		08219329 9407	
27		LALU WAHYUDI ADIGUNA	— " —		0818 368 881	
28		Estefans. Baramuli	Nelayan			
29		ADOLFINCE A. MOTES	DKP Prov. NTT	anitamassy@gmail.com.	081270196 339	
30		Samsudin CHAN	SUPLAYER BURU		081248723257	
31		Umar Papalia	Nelayan Buru.		081240244657.	
32		HASBAN HUSEN	NELAYAN BACAN		081245054484	
33		Ahmad Romdon	LIPI Ambon	ahmadromdon43@gmail.com	08222901 6205	
34		Nostenly D. Bungan	KONEL Morotai Taruna Selatan		081238186730	
35		RYKE A.A LUGAS	DKP MANADO		08134011 8921	
36		DIAN OKITRI	DIT. PDK - DJPT		08119877123	
37		PAUDINO USMAN	SANANA		085298065506	
38		TAMRIN	NTT		082 193 649 198	
39		Yonathan A	NTT		081 335 159 264	
40	MRS	SUFYANI M. SAHAMI	TERNACE	sufyanimsahami@gmail.com	081270535685	
41		RUSTANG	BONE		082 348 674 589	
42		RUDIMAN WALLY	SERAM UTARA			
43		ZAINUDDIN QUI	SANANA			
44		TONI MARTAWIJAYA	SANANA			
45		LA ODE JAERUDIN	SERAM UTARA			
46		SAKRI ISHAK	HALSEL			
47		SAHID, BAMPE	SUPYYER		082290839317	
48		SARMAN HIJAN	SUPLIER		081344638362	

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
49	Mr.	Deky Dulca	DKP-PROV-NTT	dkyriel@gmail.com	08123750110	
50	Mr	N MRICKYS	BHKLN		081284925995	
51	Mrs.	SILVIA	BHKLN		0812 1111 8790	
52		LA MASIUDA	DINAS PERIKANAN MALTENG		081288478131	
53		M. IBAN. CATUWAEL	DKT. BURU		082221028495	
54		Lady. T. Soewarlan	UNDANA - KUPNG	lady.cindy@gmail.com	085 237 032 489	
55		Besweni	DJPT - KKP		081110796	
56		ALIF P.	DJPT		08121582478	
57		Shinta Yuniarta	YKAN	syuniarta@yahoo.com	081289861959	
58		Remo Kusumastuti	PSDI - DJPT	enokusumastuti@gmail.com	0878 324 99 387	
59		LILI WIDODO	PSDI - DJPT	lili.widodo@gmail.com	08125171145[illegible]	
60		Dony Armanto	Dit. PSDI	dony.armanto@bbp.go.id	0811 1981 511	

61		I KETUT PURCANA	DKP BALI	purcana28@gmail.com	08123914965	
62		H. Hamiya	pengusaha	h.hamiya2779@Gmail.com	087865676100	
63		AUDY DIEN	DKPD PROV. SULUT	audi.dien@gmail.com	082188999307	
64		Satya Mardi	Dit. PSDI - DJPT	sdi.djpt@yahoo.com	081311470075	
65		Budy Wiryawan	IPB / MDPI	bud@psp-ipb.org	08121104260	
66		ABDUL MUIS	AP2HI	abdul.muis@ap2hi.org	081213845878	
67		Hary Christiyanto	Dit PSDI	sdi.djpt@yahoo.com	08111499422	
68		Riana Handayani	Dit. PSDI			
69		ILHAM	DIT. PSDI	ilham@kkp.go.id	081215332123	
70		ABDUL HARIS	DKP MALUKU	abdulharisanwar@gmail.com	081343027234	
71		A. Umarella	DKP Halmahera		081343018857	
72		Saraswati A	WWF ID	sadityarini@wwf.id	081325082173	
73		ANIKA. TL. BELLA	DINAS PER KUPANG		081337525544	
74		M. Maskur. T	WWF-ID	mtamamjiv@wwf.id	08114706436	
75		Pramudya Aditama	DIT. PSDI	vidyabrata@gmail.com	081310084005	
76		Ridwan Malik	Dit. PSDI	evaluasisdi@gmail.com	087887864296	
77		M. Janib Achmad	FPK Ankhair TTE	mjachmad@yahoo.com	085240009422	
78		ARIS SUDIARTO	DIT. PSDI - DJPT	arisbudiarto@kkp.go.id	082125232787	
79		Panca Berkah	Dit. PSDI	panca2237@gmail.com	0852-1360-2366	
80		Antonius Siregar	Dit. PSDI	perairanumum@gmail.com		
81		Abrizal Ang	PT. SMS	abrizal.ang@gmail.com	081244499997	
82		Edwison S.F.	Dit PSDI	edwisonsf@kkp.go.id	081291361886	
83		Aris Setiawan	Dit. PSDI	ar.setiawan21@gmail.com	081213394209	
84		Kamarudin.	PPN Ternate.	kamarudin@kkp.go.id	085245682535	

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
85	Ms	Rista Deli Juniar	Dit. PSDI	rista_juniar@kkp.go.id	082311427743	
86	Mr	Handan N. Hoo	KAPI	handan@kkp.go.id	081917674847	
87	Mr.	MUHAMMAD IQBAL	KAPI	igallewser@gmail.com	081377214089.	
88	Mrs	PUTUH SUADELA	Dit. PSDI	sdi.djpt@yahoo.com	081288066544	
89	Mrs	Dwi ENI J.	Dit. PSDI	sdi.djpt@yahoo.com	081298229533	
90	Mrs	Siti Kamarigis	Dit. PSDI	s.kamarigis@yahoo.com	081212797133	
91	Mr	Sofiyanto	Sekretariat dit jen djpt		0812975965	
92		BAMBANG S	DIT. PP.	bs.sugiharto@gmail.com	082241599789	
93		akhnes	Dit. PSDI		081282774756	
94	Mr	ILHAM S	Dit. PSDI	sdidjpt@gmail.com	085694170740	
95	Mrs	Yuni Trikumoro W	Dit PSDI		08568089628	
96	Mrs	Tuti Umiyanti	Dit. PSDI		081310752204	

97	Mr.	CECEP R WAHYUDI	KKP DJPT	cecep.wahyudi1980@gmail.com	08968070 0882	
98	Ms	Rahma Dymi I.	KKP DJPT	rahma_dymi@yahoo.co.id	08128895580	
99	Ms	Novia	KKP DJPT	novia_dkp@yahoo.com		
100	Mr.	Ridwan M.	KKP		08131449600	
101	Mr	Gunawan DN	KKP DJPT	gunawan.dn@gmail.com		
102	Mrs	ERNA Y.	KKP DJPT		081388337938	
103	Mr.	Yoga Hutapea	JFMD-DJPT	[illegible]	081[illegible]66	
104	Mrs.	Enitawati	PSDI-DJPT	enitaro409@gmail.com	08121337647	
105	Mrs.	Nur Ika F.	PSDI - DJPT	nurikafatriana@gmail.com		
106	Mrs.	Wahyuni	PSDI - DJPT			
107		Sarah Hutapea	PT. Harta Samudra	sarah.megia.hutapea@gmail.com	08124719165 4	
108	MR	Gede Mahendra	PT HATFIELD	mahendra@hatfieldgroup.com	081297429227	
109	Yudith	Yudith	PT. PBN	ypw@pbn.co.id	081315233600	
110	Teguh	Teguh	PT. PBN	logexim1@pbn.co.id		
111		Rizal Rifai	Dit. PSDI	sdidjpt@gmail.com	08787229399 9	
112	MR	FARID MAKUF	USAID OCEANS	farid.[illegible]@communi[illegible]	0816 824584	
113	Ms	Wiyati Mars	WFF			
114	Mrs	Siti Patuniasih	Dit. PSDI			
115	Mr	Sight Hery	PTHI	sight@hatfieldgroup.com	0811 28 66660	
116	Mrs.	Erni Widjajanti	Dit PDK - DJPT			
117		Saiful Umam	Dit PDK			
118	M.	A FAUZIE	DIT. PP-DJPT			
119	Mr.	M. ARIF F	Dit. PP - DJPT			
120		Mahmud C	Dinas Kelautan			
121	Mr	TRIAN YUNANDA	Dit PSDI	trian_fishery@yahoo.co.id	081218884002	
122	Mr.	M. Ichwan	Dit PDK		081311444943	
123	Mr	Sriyono	Dit PSDI		0022 3318 8784	
124	Mr	ADHARI	DIT PSDI		085711088135	
125	Mrs	Tristantina Sinaga	Dit. PPP		081294087629	
126	Mr.	Ade S. Jawar	Dit. KAPI		08126868780	
127	Mr.	Haryo Topo Y.	Dit. KAPI		081579399 24	
128	Mr.	Lukman N. H	Dit. PP		081213809319	
129	Mr.	Budi. R.	Dinas Kab. Sukabumi	b_rakhman@yahoo.co.id	085313122276	
130	Mr	SUHARDI	DJPT		08787500068 1	
131	Mr	Meri	IPNLF	meri@ipnlf.org	081295455928	
132	Mrs	Destini Yunior	DJPT/PSDI		081208113910 8	

133	MIR	MIAZWIR	DJPT			
134	MR	WISNU I.T	PDSI	wisnu.tama@pertamina.com		
135	MS	FIFIN HIJRAH B.	PSDI-DJPT			
136	Ms	Suci Yuli A	FAO / PSDI	suci.artanti@fao.org		
137	Mrs	Cilnayenti	Dit. PSDI	cilnayenti@gmail.com		
138	Mr	Irwansyah	Dir. PSDI		081284883429	
139	Mr	Rizka Cahyo N	PSDI			
140	Mr	ALZA P	BHKLW		Jole	
141	Mr.	Andi Fauzan	EDF	afauzan@edf.org	081342616397	
142	Mr.	Frengky Sihanbing	USAID Oceans	frengky.sihanbing@oceans-partnership	0878 6063 2707	
143	Ms	Novena P.	USAID Oceans	Novena.Parengkuan@oceanpartnership	085298396597	
144	MS	MENENO	PSDI. DJPT		089651425721	
145		Saut Tampubolon	MDPI			
146		Deirdre Elizabeth D.	MDPI			
147		Wildan.	MDPI	wildan@mdpi.or.id	0812382 7067	
148		A. Riza Baroqi	MDPI			
149		Putra Satria Timur	MDPI			
150		Bachori Dhian P.	MDPI		085849729 4728	
151		Ida Ayu Adnyani.	MDPI		081237207655	
152		Santri Dinalhusna	MDPI			
153		Eva Stephani	MDPI	stephani@mdpi.or.id	08113863370	
154		Maqfir M Papalia	MDPI	maqfirpapalia@gmail.com	082248172808	
155		Karel Yerusa.	MDPI			
156		Onya Deby.	MDPI.	onya.dy@mdpi.or.id	081318454901	
		AFZIL K	DJPT			

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
157		Widi Artanti	MDPI			
158		Amrullah.	MDPI			
159		Prayaga M. Huda.	MDPI			
160		Arif Sapril	MDPI			
161		Sven Blankenhorn	FTUSA	sblankenhorn@fairtradeusa.org	+62 815 252 2257	
162		Irna Sari	USAID - SEA	irna.sari@sea-indonesia.org	0813 755 395 806	
163		GAYATRI	LINI	gayatri@lini.or.id	0812 3879 177	
164		FERRY GUNAWAN	PT chen wou fishery	Fergun@indosat.net.id	0811 414 750	
165		Ivonne S. Peleh	PT. Sinar Pure Foods Int'l	ivonne.peleh@ptsinarpurefoods.com	0815 406 05942	
166		Jauvar Dwi Putra	Packard Foundation.	putra.jauvardwi@gmail.com jputra@packard.org.	0815 0509 1159	
167		M. ICHSAN	USAID SEA Project	Muhammad.ichsan@SEA-indonesia		
168		Henry H.	Company.	henry@pbn.co.id	0812 977 977 08	
169		Stephani	-"-	stephanibitha@gmail.com	0812 966 43 465	
170		Galih Ernowo	DITKAPEL KEMENHUB		08161615604	
171		Christie	DKPD Sulut	titisaruan@gmail.com	0853 423 27 999	
172		Nani	CI		0811 989 357	
173		Anton	Konsultan	antonemus@gmail.com		
174		M. Rays Barrul	Dit PSDI	sdi.djpt@yahoo.com	085722738797	

DAFTAR HADIR MEDIA

Kegiatan : FCMC Regional Jakarta

Hari/tanggal : ~~Kamis~~ Rabu 18 h, ~~19~~ Desember 2019

Tempat : Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15 Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	EMAIL	TANDA TANGAN
1	Anisyah	Merdeka.com	0822-1663-7992	anisyah.alfaqir@kly.id	
2	Roby	Beritasatu TV	0812 8226 5798		
3	Fkerdi	Aktik.com	0882 13640947		
4	Yasir	Suara.com	082111 Googgy		
5	Rizal	Disca			
6	Alfi	DJPRL	0813286998 55	humas prl@gmail.com	
7	Vidha	PJ PRL	085272368603	vrasady@gmail.com	
8	Gratia	Kompas TV	0895393038752		
9	Guntur	— " —			
10	Werdha	BHKLN	081319996928		
11	Joko	BHKLN.	081 4 882913		
12	ICI	BHKLN.	0812563125		
13	Caca.	BHKLN.	08125423528		

14	Fika	kompas.com	0838 9762 0031		
15	Kurnia	Kutadata.co.id	085876188117		
16	Culuta	Kompas			
17	SYINTA	Bisnis Indonesia			
18	NURSYAMSY.	HARIAN DETIK NET	0821 2266 6557		
19	M.DAVID	Jendela news co.id	0812 11334377		
20	Ambari	Morgabay	0812 228 99988		
21					

19 Desember 2019

ATTENDANCE LIST

ACTIVITY : FCMC Regional II Jakarta
DATE : 19 Des 2019
PLACE : Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari 4 lantai 15, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
1	Mr.	AZIS	DKP Kab. Lotim	cavaniqiujadoh2012@gmail	085239507097	
2	Mrs	ENDANG. DAHLAN	SUPLAYER		085240243950	
3	Mr	LA MASIUDA	DKP MALTENG		081288478131	
4	Mrs	ROSATI HIJAH	Suplayer		081240274954	
5	Mr	ZAINUDIN QUI	SUPLACK			
6	Mr	TONI MARTAXIA	Suplack			
7	Mr	HASDULLAH	—		085397827792	
8	Mr	SAMSUDIN CHAN	SUPLAYER		081248723257	
9	Mrs	Shinta Yuniarta	YKAN	syuniarta@yahoo.com	081289861959	
10	Mrs	Stephani	campaign	stephanibitha@gmail.com	08129664346 9	
11	Mr.	LALU WAHYUDI A	DKP PROV NTB			
12	Mr	AHDIAT. M.T	— " —		0821 9329 9407	

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
13	Mr	Karel Yerose	MDPI	karel@mdpi.or.id	081343490026	
14	Mr	Maqfir M. Papalia	MDPI	maqfirpapalia@gmail.com	082248172808	
15	Mr	Kamarudin	PPN Ternate.	kamarudin@kkp.go.id.	085245682535	
16	Mr.	Ridwan. M	Dit. PSDI	evaluasi sdi@gmail.com	087887861206	
17	Mrs	Ratna Dynni	Dit. PDK	ratna_dynni@yahoo.co.id	081998881999.	
18	Mrs	Novia	DOPT KKP			
19	Mrs	SARASWATI. A	WWF-ID	sadityarini@wwf.id	081325082173	
20	Mrs	SUFYANI M. SAHAMI	DKP KT. TERNATE	sufyanimsahami@gmail.com	081270535685	
21	Mrs.	APOLFINE A. MOZES	DKP-Prov. NTT	anitamassy@gmail.com	081270196339	
22	Mr	Yonathan A	NTT		081339159264	
23	Mr	Iketut Purnama	DKP BALI	purnama28@gmail.com	081239149668	
24	Mrs.	Christie Sarvan	DKP SULUT	titisarvan@gmail.com	085342727999	
25	Mr.	Sarno Cajiwa	Nelayan		082192817504	
26	Mr.	SAHRUL ALI	NELAYAN			
27	Mr.	FEBRIAN BUDIANTO	DKP SUL-SEL	fapdik739@gmail.com	08124270114	
28	Mr.	Satya Mand	Dit. PSDI - DOPT	sdi.dopt@yahoo.com	081311470077	
29	Mrs	Wiwi YANTY ANDAKI	Tibo - Tibo		081355418914	
30	Mr.	Estefanus B	Nelayan			
31	Mr.	Gede Mahendra	PT HATFIELD	mahendra@hatfieldgroup.com	081297429227	
32	Mr.	Wildan	MDPI	wildan@mdpi.or.id	081 23827067	
33	Ms.	Stephani Manqunsong	MDPI	stephani@mdpi.or.id	08113863370	
34	Mr.	Anton Mukajir	Konsultan	antonemus@gmail.com	0817348799	
35	Mr	UKON AK	DJPT	ukon_at@yahoo.com	08111101676	
36	Mr	Beswani	DJPTI		08111107796	
37	Mr.	Alfret Luasunang	FPIK Unsrat	a.luasunang@unsrat.ac.id	082187247893	
38	Mr	M. Roys Birrul M	Dit PSDI	sdi.dypt@yahoo.com	085722738797	
39	Mrs.	Husri - Mododani	Suplayer		082192615888	
40	Mrs	RYKE A. A LUCAS	DKP MANADO		081340118921	
41	Mrs	MASITA LOHOR	DKP MOROTAI		081341527893	
42	Mr	Efraim Lumentut	Suplayer		081342679468	
43	Mr.	Syaiful Lily	DKP Sul Sel	syaiful.lila63@gmail.com	082347007481	
44	Mr	Rudiman Wally		Nelayan		
45	Mrs.	Henry Handayani	Company PBN.	henry@pbn.co.id.	0812-974-977-08	
46	Mr	M. ICHSAN	USAID SEA	Muhammad.Ichsan SEA	0812-89175392	
47	Mr	RUSTANG		NELAYAN	082348674589	
48	Mr	ILHAM	DIT. PSDI	ilham@kkp.go.id	081219332123	

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
49	Mr.	HARUNA	FPIK-UNPATTI	haruna.unpatti@gmail.com	081247758894	
50	Mr.	Budy Wiryawan	IMPPI / IPB	bwd@ipb-ipb.org	085241004260	
51	MrS	Yetna Bawoel	Suplayer Sangir		00138557 1380	
52	Mr.	M. IBAN LATUWAEL	KP. GURU		082221028495	
53	Mr.	AGUSALIM	DKP		082345640872	
54	Mr.	Umar Papalia	N. Kab Buru		0812 4024 4683	
55	Mr.	Ahmad Romdon	LIPI Ambon	ahmadromdon.lipi@gmail.com	0822 3901 6205	
56		ANASRIWHI HAMDJAH	SUPLAER TERNATE		08114332306.	
57		ISRA. VALEUR	BENDAHAR. K		085343046106	
58		LA ODE JAERUDIN	SUPLAER			
59		Salman Adam	Nelayan		081356460606	
60	Ms.	Ida Ayu Adnyani	MDPI		081237207655	
61	Mr.	PALIDING USMAN			085298665506	
62	Mr.	LATOHIA	NELAYAN		0812 40791394	
63	Mr.	Arif Sapril	MDPI	arif.sapril@mdpi.or.id	0811 179 1704	
64	Mr.	Sigit Hem	PTHL		081138666660	
65	Mr	Bachori	MDPI		085847294728	
66	Mr	SAPRI ISHAK	DKP HALSEL		081355 647905	
67	Mr	HASBAN HUSEN	NELAYAN		0812 45054484	
68	Mr	SARMAN HIJAN	Suplier		081344638362	
69	Mr	Soyce - GAGER	SUPLAER.		0852.404.3066	
70	Mrs	ANIKA. TL. BELLA	DINAS KOTA Kupang		081337525544	
71	Mr	JOEY PEDRASAS	USAID Ocean		639502038124	
72	Mr	Heri	PBN	heri.heri.0780@gmail.com	081295416598	
73		Murliah	Untuk	li.buhari@gmail	081342603475	
74		Lady - Cindy	FKP UNDANA	lady.cindy@ymail.com	085 237032489	
75		Novena Parengkuan	USAID Oceans	novena.parengkuan@gmail.com	085298356599	
76		Nuriasih Nababan	AP2HI	nuriasih@ap2hi.org	085216042493	
77		MENENG	DJPT. PSDI		089652572 1	
78		Zxany	DJ PSDI	any.p@kelautan.go.id	0857 1057 0446	
79		Wurgito Momi	WFF			
80		Stan Slankenhorn	FTUSA	Slankenhorn@fairtradeusa.org	0815252 2251	
81		M. Ichsillah	DJPT. PDK	muhammad.ichsillah@gmail.com.		
82		Mosfenly D. Bungar	KOPHEL TARUNA Selatan Morotai		081218 6730	
83		Anthony Alvin	MSC	anthony.alvin@msc.org	0811 719556	
84		Timur	MDPI			

No.	Honorific Mr./Mrs./Ms.	NAME	ORGANIZATION	EMAIL	PHONE	SIGNATURE
85	TAMR	TAMRIN	NTT(NELAYAN)		082 192 649 198	
86	Mr.	Deby Duka	DKP NTT		081237501110	
87	Mr	SAHID, BAPIPE	SUPPLER TTC		082290839317	
88	Mr	ABDULRAHMAN A	DKP MALUKU		0812 9130 [illegible]	
89	Mr.	Abdul Haris	DKP MALUKU		081343027234	
90	Mr	Ahmad Usmarella	DKP Ternate		081343018857	
91	Mr.	Aris Sarana	DA. 8800		0812-1334-4209	
92	Mr.	Frengky Simanjuntak	USAID oceans		0878 6063 2787	
93		M. Janib Achmad	univ. Khairun		085240094422	
94	Mr.	M. Khazali	Ternate EDI		081111666256	
95	Mr.	Edwicon. S.F	Dit. PSDI			
96	Ms	Jiyun Q	WCS-IP		085619008286	
97	Mr	Aupy DIEN	DKPD Sulut		0812 [illegible] 9992 07	
98	Ms.	Rista Dewi Juniar	Dit-PSDI	rista.juniar@kkp.go.id	082311427743	
99	Mrs	Ivonne S. Peleh	PT SPFI	ivonne.peleh@ptsinarpuntas	081340603944	
100	Mrs	Sarah Hutapea.	PT. Harta Samudra		081247191654	
101	Mrs	wodi Artati	MDPI		08136614757.	
102	Mrs	Dwi ENI J.	Dit. PSDI		081298295335	
103	Mrs.	akhnes	Dit. PSDI		081282774776	
104	Mrs.	Tuti Cmiyanti	Dit. PSDI		081310752284	
105	Mrs.	Enitawati	Dit. PSDI-DJPT	enitaro-109@gmail.com	081213376 47	
106	Mrs.	Wahyuni	Dit. PSDI-DJPT		0813 143 444 79	
107						
108						

Lampiran 4. Link Download Materi Presentasi dan Dokumentasi
https://drive.google.com/drive/folders/1vHf6aH6YR7O5pnXhLvbQF4JoLdwd1h1w

Lampiran 5. Link Berita Kegiatan Pertemuan Regional FCMC-II

1. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4827151/keluhkan-harga-bbm-nelayan-ikan-tuna-ngadu-ke-edhy-prabowo
2. https://bisnis.tempo.co/read/1285125/soal-ekspor-benih-lobster-edhy-prabowo-saya-tidak-akan-mundur/full&view=ok
3. https://ekonomi.bisnis.com/read/20191218/99/1182558/polemik-ekspor-benih-lobster-menteri-edhy-saya-tidak-akan-mundur
4. https://jpp.go.id/ekonomi/kemaritiman/339678-kkp-mdpi-sinergi-wujudkan-pengelolaan-tuna-berkelanjutan
5. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4136946/menteri-edhy-ngotot-buka-keran-ekspor-benih-lobster
6. https://www.merdeka.com/uang/menteri-edhy-dorong-nelayan-manfaatkan-kur-beli-kapal-besar-di-2020.html
7. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4137037/menteri-edhy-minta-nelayan-kecil-tambah-kapasitas-kapal-demi-perbanyak-tangkapan
8. https://www.merdeka.com/uang/menteri-edhy-ungkap-preman-kuasai-bbm-subsidi-untuk-nelayan.html
9. https://indonesiainside.id/ekonomi/2019/12/18/menteri-edhy-prabowo-sebut-stasiun-pengisian-bbm-nelayan-dikuasai-preman
10. https://youtu.be/xp4rqxBXNZY **(YouTube)**

Lampiran 6. Topik Isu Diskusi untuk Panelis

Panelis Ke-I

A. Topik : Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi Nelayan

Narasumber : DKP Provinsi Sulawesi Selatan

Kendala-kendala:

1. Pengurusan akte notaris untuk badan hokum KUB/Koperasi Nelayan cukup mahal
2. Jumlah minimum anggota 20 orang sebagai sarat pembentukan Koperasi Nelayan, hal ini dirasa sulit untuk dipenuhi.
3. Jika nelayan tidak dibantu hal ini, maka nelayan kesulitan memperoleh bantuan dari Pemerintah karena diperlukan KUB/Kelompok Koperasi sebagai syarat untuk mengakses bantuan dari Pemerintah.

B. Topik : Proses Penerbitan Kusuka

Narasumber : DKP Maluku
Kendala-kendala:

1. KUSUKA belum familiar kepada supplier dan nelayan
2. Bagi nelayan dan supplier yang telah mengetahui tentang KUSUKA, masih mengalami kesulitan untuk memperoleh kartu KUSUKA
3. Pekerjaan nelayan di KTP umumnya tercantum sebagai petani, mengakibatkan kesulitan dalam proses pendaftaran ke KUSUKA
4. Sebagai contoh, MDPI telah menfasilitasi KUSUKA di Buru sebanyak 180 nelayan, Seram 150 nelayan, dan Lombok 30 nelayan, hingga hari ini belum ada KUSUKA yang diterima nelayan.

C. Topik : Kebijakan BBM Bersubsidi untuk Nelayan Kecil

Narasumber : DKP Maluku Utara
Kendala-kendala:

1. Ketersedian premium sangat terbatas, sehingga nelayan menggunakan pertalite.
2. Nelayan umumnya membeli dari pihak agen/pangkalan dengan harga yang lebih tinggi mengakibatkan biaya opersional meningkat tajam.
3. Nelayan mengalami kesulitan membeli langsung ke SPBU/APMS, disebabkan:

a. Diperlukan kartu nelayan
b. Wajib mendapatkan nomor antrian

4. Nelayan memerlukan pelayanan APMS sampai ditingkat pedesaan yang memiliki aktivitas perikanan tangkap/tuna yang produktif.

Panelis ke-II

A. Topik : Pemanfaatan Rumpon

Narasumber : DKP NTB

1. Nelayan mengalami masalah dalam pengurusan izin Rumpon
2. Rumpon yang dipasang dianggap illegal karena tidak berizin sehingga dihawatirkan hasil ikan nelayan yang ditangkap di rumpon dari hasil tangkapal tidak legal, serta produk tuna yang di export juga perlu diidentifikasi apakah dari rumpon atau tidak.
3. Dalam hal SIPI diterbitkan oleh Provinsi, diharapkan ada penjelasan tentang pengurusan izin rumpon di atas 12 mil.

B. Topik : Pendaftaran Buku Kapal Perikanan dan Penandaan Kapal Perikanan untuk Kapal Sampai dengan 30 GT.

Narasumber : DKP Sulawesi Utara

1. **Berdasarkan Pasal 36, Undang-Undang No. 31 tahun 2004:** (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Dan **pasal 37, Undang-Undang No. 31 tahun 2004:** Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkapan ikan.
2. Berdasarkan PERMEN KP, No. 5 Tahun 2019 (Perubahan atas Permen 23 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal) terdapat kewajiban Pemda untuk menerbitkan Buku Kapal Perikanan dan Penandaan Kapal Perikanan.
3. Bagimana pelaksanaan kebijakan ditingkat Provinsi?

C. Topik : Penerbitan Pas Kecil atau Pas Besar Kapal Perikanan

Narasumber : DKP NTT

Penerbitan Pas Kecil dan Pas Besar:

1. Waktu pengurusan Pas Kecil terlalu lama, bisa sampa 3-5 bulan.
2. Nelayan sering mendapat informasi bahwa UPP sering keterbatasan blangko Pas Kecil
3. Pengesahan perpanjangan Pas Kecil harus dilakukan setiap tahun dan hal ini menimbulkan kesulitan bagi nelayan karena nelayan tersebar diberbagai desa
4. Terdapat kapal yang hanya diberikan surat ukur dan Pas Besar sementara. Penerbitan Pas Besar dan Surat Ukur asli memerlukan waktu hampir 1 tahun.
5. Nelayan dan pengurus kapal merasa bahwa pengurusan Pas Kecil dan Pas Besar sangat rumit, karena terdapat persyaratan memerlukan NPWP (Pas Besar).